

**KOLABORASI AKTOR *HEPTAHELIX* DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA BERBASIS *SMART VILLAGE* DI PEKON RIGIS JAYA
KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Oleh

DIAN KAGUNGAN

Disertasi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN**

Pada

**Program Doktor Studi Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KOLABORASI AKTOR *HEPTAHELIX* DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS *SMART VILLAGE* DI PEKON RIGIS JAYA KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh

Dian Kagungan

Agrowisata Kampoeng Kopi Pekon Rigis Jaya merupakan kawasan wisata yang mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan “konsep baru” *Heptahelix* dalam kebijakan pengembangan pariwisata berbasis *smart village*; mengkaji kolaborasi aktor dalam model inovasi *Heptahelix*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap *key informan* yang relevan serta dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah kolaborasi aktor *Heptahelix* sangat penting dalam pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi. Pemerintah melakukan kolaborasi dengan akademisi untuk peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata, kemudian dengan PLN, Bank Lampung, Bank BRI untuk meningkatkan sarana dan prasarana, kolaborasi dengan masyarakat lokal, Badan Usaha Milik Desa dan mitra Asosiasi Desa Wisata Indonesia membentuk galeri UMKM dan Wirausaha Muda Nusantara. Kolaborasi dengan media untuk promosi melalui media *on line* (*kampoeng kopi_rigis_official*) dan *kopi rigis_coffecompany* serta *pariwisata_lampung_barat* dan *lambar geh*. Kegiatan pengembangan wisata kuliner dengan NGO Asosiasi Desa Wisata Indonesia dan pegiat pariwisata “Keliling Lampung”. Kolaborasi dengan milenial yang tergabung dalam *Indonesian Fighthter Tourism Association* (IFTA), *Generasi Pesona Indonesia* (GenPI Lampung) yang melakukan kegiatan seperti menciptakan destinasi wisata digital dalam bentuk wisata edukasi. Sementara itu, pelaksanaan *smart village* di Pekon Rigis Jaya terdapat *website* resmi dengan alamat www.rigisjaya.smartvillage.co.id dan penggunaan aplikasi *OpenSID*. Kendala yang dihadapi sosialisasi program *smart village* yang dilakukan oleh pemerintah pekan belum menyentuh semua lapisan masyarakat sehingga tidak semua masyarakat memahami program ini. Serta belum tersedianya panduan atau tempat layanan khusus untuk mengakses teknologi penunjang *smart village*.

Kata kunci : kolaborasi, *heptahelix*, pariwisata, *smart village*

ABSTRACT

COLLABORATION OF HEPTAHELIX ACTORS IN THE DEVELOPMENT OF SMART VILLAGE –BASED TOURISM IN PEKON RIGIS JAYA, AIR HITAM DISTRICT, WEST LAMPUNG REGENCY

By Dian Kagungan

Kampoeng Kopi Pekon Rigis Jaya Agrotourism is a tourist area that received the 2021 Indonesian Tourism Village Award. The aim of this research is to produce a "new concept" of the inner Heptahelix smart village-based tourism development policy; studying collaboration actors in the Heptahelix innovation model. Methods used in research This is a qualitative, descriptive approach, data obtained through observation, interviews with relevant key informants, and documentation. Data was analyzed via data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that the collaboration of heptahelix actors is very important in the development of Kampoeng Kopi Agrotourism. The government collaborates with academics to increase the capacity of tourism awareness groups, then with PLN, Bank Lampung, Bank BRI to improve facilities and infrastructure, collaboration with local communities, Village-Owned Enterprises and Partners of the Indonesian Tourism Village Association formed a gallery for MSMEs and Young Entrepreneurs of the Archipelago. Collaboration with the media for promotion through online media (*kampoeng kopi_rigis_official*) and *kopi rigis_coffecompany* as well *tourism_lampung west* and *lambar geh*. Tourism development activities culinary with the NGO Indonesian Tourism Village Association and tourism activist "*Keliling Lampung*." Collaboration with millennials who are members of *Indonesian Fighter Tourism Association*(IFTA), *Generasi Pesona Indonesia (GenPI Lampung)* which carries out activities such as creating digital tourism destinations in the form of educational tourism. Meanwhile, the implementation of the smart village in Pekon Rigis Jaya has a website official with the address *www.rigisjaya.smartvillage.co.id* and application use *OpenSID*. Obstacles faced by the socialization of the smart village program carried out by the Pekon government has not touched all levels of society So not all people know about this program, and yet availability of guides or special service places to access technology supporting smart villages.

Keywords: collaboration, heptahelix, tourism, smart village

Judul Disertasi : **KOLABORASI AKTOR *HEPTAHELIX* DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS *SMART VILLAGE* DI PEKON RIGIS JAYA KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa : Dian Kagungan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2036011002

Program : Studi Pembangunan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Promotor,


Prof. Dr. Hartoyo, M. Si.

NIP. 196012081989021001


Dr. Bambang Utoyo S, M.Si

NIP. 196302061988031002

2. Ketua Program Doktor Studi Pembangunan,


Dr. Bambang Utoyo S, M.Si

NIP. 196302061988031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M.,
ASEAN Eng.
(Rektor Universitas Lampung)

Sekretaris

: Dr. Dedy Hermawan, M.Si
(Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Lampung)

2. Penguji Eksternal

: Prof. Dr. Imam Santosa, M. Si.
(Universitas Jenderal Soedirman)

3. Promotor

: Prof. Dr. Hartoyo, M. Si.

4. Co-Promotor

: Dr. Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si

5. Penguji Internal

: Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S
Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D
Dr. Dra. Feni Rosalia, M.Si
Dr. Tina Kartika, S.Pd.,M.Si

6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dra. Iva Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

7. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Disertasi: 15 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN DAN PUBLIKASI ISI DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Disertasi yang berjudul **“Kolaborasi Aktor Heptahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis *Smart Village* di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat”** ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Permendiknas, No. 17 Tahun 2010.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Disertasi pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim promotor atau author dan FISIP Unila sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester atau enam bulan sejak keseluruhan Disertasi ini, maka Program Doktor Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila berhak mempublikasikan pada jurnal ilmiah yang dituju/dikelola oleh Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung. Apabila saya melakukan pelanggaran dan ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Dian Kagungan
NPM 2036011002

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Dian Kagungan, lahir di Tanjung Karang pada tanggal 15 Agustus 1969. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara bapak Hi. Akram Pasya (almarhum) dan ibu Roehani. Menikah dengan Ir. Rozi Hasyim dan di anugerahi 2 putera. Pendidikan Sarjana diselesaikan pada tahun 1992, pendidikan Magister selesai pada tahun 2005 dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, saat ini bertugas sebagai Dosen tetap Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain di bidang penelitian: penelitian hibah bersaing, penelitian hibah strategis nasional dan penelitian terapan unggulan Perguruan Tinggi, yang dibiayai Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DP2M), Kemenristekdikti, Jakarta (sejak tahun 2009-2021), Penelitian Terapan BLU Universitas Lampung Tahun 2022-2023 serta publikasi di jurnal terakreditasi nasional, internasional dan internasional bereputasi. Selanjutnya bidang kegiatan Pengabdian kepada masyarakat antara lain Pengabdian Unggulan Dipa BLU Universitas Lampung sejak tahun 2010 dan Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Binaan Universitas Lampung Tahun 2023. Penulis juga menulis beberapa buku di tahun 2017, 2019 dan tahun 2020 serta memperoleh Sertifikat Karya Cipta (HKI) Tahun 2015-2022

MOTTO

“ALLAH tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Qs. Al-Baqarah:286)

“Dalam setiap kesempatan, sikap (*attitude*) baik, selalu lebih unggul dibanding kepintaran”
(Tere Liye)

Bersyukur atas semua yang telah ALLAH berikan, ALLAH adalah pemilik rencana terbaik, tugasmu adalah berikhtiar dan berdoa”
(Dian Kagungan)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Syukur *Alhamdulillah* atas Rahmat dan segala limpahan nikmat dan hidayah ALLAH SWT.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Saya persembahkan Disertasi ini kepada orang tua :

Hi. Akram Pasya (Alm) dan Ibu Roehani Yazid

Terimakasih untuk do'a-do'a yang diberikan dan terimakasih kepada suami Ir. Rozi Hasyim dan anak-anak (M. Ridho Makarim, S.IP dan M. Faridz Makarim)

Para dosen dan civitas akademika,

Yang telah memberikan dukungan, do'a, dan semangat untuk menyelesaikan studi

**Almamater tercinta,
Universitas Lampung**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya disertasi ini dapat di selesaikan. Disertasi dengan judul “Kolaborasi Aktor *Heptahelix* Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis *Smart Village* Di Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program S3 Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng yang telah berkenan hadir sebagai penguji pada sidang perdana promosi Program Doktor Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung beserta jajarannya serta staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku Ketua Program Doktor Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M. Si selaku promotor atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian disertasi ini;
5. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku co-promotor memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian disertasi ini;
6. Prof. Dr. Imam Santosa, M.Si selaku dosen penguji eksternal atas kesediannya untuk melakukan pengujian disertasi ini.
7. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D, Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si, dan Ibu Dr. Tina Kartika, S.Pd., M.Si selaku anggota tim penguji disertasi, atas kesediaannya untuk memberikan saran dalam penyelesaian disertasi ini;
8. Suami Ir. Rozi Hasyim dan Anak-anakku M. Ridho Makarim, S.IP dan M. Faridz Makarim atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan studi ini

9. Seluruh dosen Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Unila atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini
10. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung dan Ibu Ita Prihantika. S. Sos., M.A selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung
11. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Negara, FISIP Unila: Prof. Dr. Yulianto, M.Si., Dr. Bambang Utoyo, M.Si, Prof. Dr. Noverman Djuadji, M.Si., Dr. Dedy Hermawan S.Sos., M.Si., Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P., Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si., Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A., Syamsul Ma'arif, S.I.P., M.Si., Prof. Dr. Novita Tresiana, M.Si, Dr. Ani Agus Puspawati, M.AP, Intan Fitri Meutia, Ph.D., Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Anisa Utami, S.I.P., M.A., Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si., Apandi, S.Sos., M.Si, Rahayu Sulistiowati, S. Sos., M.Si, Susana Indriyati C, S.IP., M.Si terimakasih atas doa dan dukungannya.
12. Staff Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Unila dan Staff Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila terimakasih atas bantuannya
13. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2020 Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung, terimakasih atas doa dan dukungannya.
14. Serta semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung selama penulis menempuh pendidikan sampai dengan penyelesaian disertasi ini. Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT dan semoga disertasi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung 8 Maret 2024

Penulis

Dian Kagungan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Modal Sosial.....	15
2.2. Pengertian Kolaborasi	16
2.3 Komponen-komponen Kolaborasi	17
2.4 Komponen Kolaborasi dalam Penelitian	24
2.5 Peran Pariwisata dalam Pembangunan.....	26
2.6 Tinjauan tentang Agrowisata.....	27
2.7 Konsep Helix	28
2.8 Konsep Heptahelix	28
2.9 Konsep <i>Smart Village</i>	30
2.9.1 <i>Smart Government</i>	31
2.9.2 <i>Smart Community</i>	32
2.9.3 <i>Smart Environment</i>	33
2.9.4 <i>Smart People</i>	35
2.9.5 <i>Smart Promotion</i>	36
2.10 Literature Review	36
2.11 Kerangka Pemikiran	45
III. METODE PENELITIAN	47
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
3.2 Lokasi Penelitian	48
3.3 Fokus Penelitian	48
3.4 Jenis dan Sumber Data	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Teknik Analisis Data	54
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	56
3.8 Road Map Penelitian	57
IV. HASIL PENELITIAN	65
4.1 Gambaran Umum Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.....	65
4.1.1 Sejarah Pekon Rigis Jaya	66

4.1.2	Visi dan Misi Pekon Rigis Jaya.....	67
4.1.3	Struktur Organisasi Pekon Rigis Jaya	67
4.1.4	Kependudukan Pekon Rigis Jaya.....	70
4.1.5	Struktur Pengurus Kelompok Sadar Wisata Kampoeng Kopi Rigis Jaya	71
4.1.6	Gagasan Awal Pembangunan Agrowisata Kampoeng Kopi Rigis Jaya	72
4.1.7	Sejarah Singkat Sekolah Kopi Lampung Barat.....	73
4.2	Kolaborasi Aktor Hepta Helix.....	76
4.2.1	Dialog antar-muka (<i>face to face dialogue</i>).....	77
4.2.2	Membangun Kepercayaan (<i>Trust Building</i>).....	78
4.2.3	Komitmen pada proses kolaborasi (<i>commitment to the process</i>).....	79
4.2.4	Komunikasi	81
4.2.5	Koordinasi	81
4.2.6	Pemerintah.....	83
4.2.7	Komunitas	99
4.2.8	Media.....	102
4.2.9	Akademisi.....	103
4.2.10	Dunia Usaha/swasta	106
4.2.11	NGO (<i>Non Government Organization</i>)	108
4.2.12	Millennial	113
4.3	Gambaran Umum Penerapan Program Smart Village di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat	120
4.4	Hasil Penerapan Smart Village Dalam Pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi di Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam	126
4.4.1.	<i>Smart Government</i>	126
4.4.2.	<i>Smart People</i>	130
4.4.3.	<i>Smart Environment</i>	133
4.4.4.	<i>Smart Promotion</i>	135
4.5	Pembahasan	136
4.5.1	Kolaborasi Aktor Heptahelix	136
4.6	Kolaborasi aktor heptahelix dalam pembangunan agrowisata kampoeng kopi meliputi pemerintah, akademisi, masyarakat lokal/komunitas, pengusaha/swasta, media, NGO dan milenial.	137
4.7	Kolaborasi Aktor Heptahelix Dalam Kebijakan Pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi Pekon Rigis Jaya Perkegiatan	152
4.8	Penerapan Smart Village untuk Layanan Publik dan Pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.....	171
4.9.	Temuan Penelitian (Novelty)	181
4.9.1.	Kolaborasi Aktor Hepta-helix Sebagai Gagasan Baru Dalam Pengembangan Pariwisata.....	191

V. KESIMPULAN DAN SARAN 213

DAFTAR PUSTAKA 219

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1 Data Kunjungan Wisatawan Ke Agrowisata Kampong Kopi Rigis Jaya Tahun 2019-2023	5
Table 2. Aspek-aspek <i>smart village</i>	34
Table 3. Dokumen Pendukung Penelitian	50
Table 4. Daftar Informan Penelitian.....	52
Table 5. Golongan Usia Masyarakat Pekon Rigis Jaya	70
Table 6. Jenjang Pendidikan Masyarakat Pekon Rigis Jaya	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Data Kunjungan Wisatawan Pariwisata Lampung Barat 2013-2021	4
Gambar 2. Diagram Kolaborasi Heptahelix.....	30
Gambar 3. Gambar <i>Smart Village</i>	35
Gambar 4. Alternatif Smart Village	49
Gambar 5. Struktur LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Pekon Rigis Jaya.....	68
Gambar 6. Struktur Aparat Pekon Rigis Jaya.	69
Gambar 7. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Penggiat Pariwisata.....	85
Gambar 8. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Penggiat Pariwisata serta Pengembangan Kuliner	86
Gambar 9. Sosialisasi dan Pendampingan Penggiat Pariwisata Di Pekon Rigis Jaya	88
Gambar 10. Kegiatan Pelatihan serta Pengembangan Produk dan Promosi Wisata.	93
Gambar 11. Workshop Pengembangan Kompetensi Masyarakat dan Penggiat Pariwisata	93
Gambar 12. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Produk pekon/desa Rigis Jaya	95
Gambar 13. Kontribusi Peran Media dalam Promosi Kampoeng Kopi.....	103
Gambar 14. Kontribusi Peran Media dalam Promosi Kampoeng Kopi.....	103
Gambar 15. Kegiatan Pendampingan Bagi Pokdarwis	104

Gambar 16. Kegiatan studi banding bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.....	105
Gambar 17. Fasilitas yang diberikan oleh PLN	107
Gambar 18. Penanaman pohon oleh Bank BRI bersama Pokdarwis Pekon	107
Gambar 19. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Lampung	108
Gambar 20. Aplikasi Layanan Mandiri website Pekon Rigis Jaya.....	123
Gambar 21. Balai Pekon Rigis Jaya.....	124
Gambar 22. Kolaborasi 7 aktor berpusat pada Pemerintah.....	159
Gambar 23. Kolaborasi 7 aktor berpusat pada Komunitas	161
Gambar 24. Kolaborasi 7 aktor berpusat pada bisnis/swasta.....	163
Gambar 25. Kolaborasi berpusat pada Media	165
Gambar 26. Kolaborasi berpusat pada NGO.....	166
Gambar 27. Kolaborasi berpusat pada Millenials	169
Gambar 28. Kolaborasi berpusat pada academic (akademisi).	171
Gambar 29. Kolaborasi berpusat pada bisnis.....	205
Gambar 30 Kolaborasi aktor yang perpusat pada pemerintah	206
Gambar 31. Kolaborasi aktor berpusat pada komunitas	207
Gambar 32. Kolaborasi aktor berpusat pada akademisi.....	208
Gambar 33 Kolaborasi aktor berpusat pada media	209
Gambar 34. Kolaborasi aktor berpusat pada NGO	210
Gambar 35. Gambar Kolaborasi berpusat pada milenials	211
Gambar 36. Kegiatan Promosi Paket Wisata di Pekon Rigis Jaya 2023	231
Gambar 37. Kegiatan Promosi Paket Wisata di Pekon Rigis Jaya 2023	232

Gambar 38. Kegiatan Promosi Paket Wisata di Pekon Rigis Jaya 2023	233
Gambar 39. Pengunjung di Kampong Agrowisata.....	242
Gambar 40. Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Penggiat Pariwisata serta .	242
Gambar 41. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penggiat Pariwisata	242
Gambar 42. Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani	243
Gambar 43. Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani	243
Gambar 44. Kondisi Agrowisata Kampong Kopi	243
Gambar 45. Kegiatan Pengembangan serta Pembinaan Produk Komoditas Unggulan Pekon Rigis Jaya.	244
Gambar 46. Bangunan di Kampong Kopi	244
Gambar 47. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Lampung	244
Gambar 48. Kegiatan di Pekon Rigis Jaya.....	244
Gambar 49. Kondisi Ruangan Pekon Rigis Jaya	245
Gambar 50. Visi Pekon Rigis Jaya.....	245
Gambar 51. Tampak Depan Pekon Rigis Jaya.....	245
Gambar 52. Anugerah Desa Wisata Kampung Rigis Jaya.....	246
Gambar 53 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang membuat ecoprint di Anjungan Kampong Kopi	246
Gambar 54. Kunjungan pertama kali Menteri Parekraf ke Kampong Rigis Jaya	247
Gambar 55. Pelatihan Daya Guna Lahan Perkebunan Oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat di Kampong Rigis Jaya.....	247
Gambar 56. Kegiatan panen kopi bersama Bapak Zulkifli Hasan, 2022	248

Gambar 57. Kegiatan penanaman pohon hijau di lingkungan Agrowisata Kampoeng Kopi bersama mitra Bank BRI	248
Gambar 58. Kegiatan oleh DJP Kota Bumi Seminar Kewusahaan untuk UMKM Lampung Barat.....	249
Gambar 59 Kegiatan Promosi Agrowisata Kampung Rigis oleh.....	249

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi pariwisata di Indonesia memiliki peran signifikan dalam memberikan kontribusi pada devisa negara dan menjadi sektor ekonomi terpenting setelah dua sektor lainnya yakni pajak dan ekspor. Dalam konteks krisis yang sedang dihadapi oleh negara-negara maju, termasuk Eropa, pengembangan sektor pariwisata menjadi pendekatan dan strategi baru dalam membangun ekonomi nasional. Dampaknya adalah terciptanya ikatan antara industri pariwisata dengan berbagai sektor lainnya, seperti produksi barang dan jasa, makanan khas, souvenir, perjalanan wisata, hotel, dan penginapan sederhana, yang pada gilirannya memberikan peluang mata pencaharian bagi masyarakat yang berada di sekitar atau berhubungan langsung dengan lokasi pariwisata.

Namun di samping besarnya peluang pariwisata Indonesia, ada beberapa kendala dalam pengembangan pariwisata, selain akibat dari dampak pandemi *covid* 19 juga diantaranya adalah mutu pelayanan bagi para wisatawan dan kesadaran masyarakat mengenai pengembangan sektor pariwisata masih tergolong rendah. Akan tetapi di sisi lain, melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap *dollar* akan menjadi peluang bagi pengembangan pariwisata, dan Indonesia perlu mengeksplorasi strategi baru dalam mempromosikan destinasi pariwisatanya, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet virtual. Optimalisasi promosi pariwisata secara online dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk menarik perhatian wisatawan, terutama kalangan generasi milenial, dengan biaya yang lebih terjangkau. Tentu saja, dalam hal ini masyarakat menjadi subyek sekaligus obyek dalam pengembangan pariwisata, namun masyarakat tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah dengan konsep, aturan dan pendanaan yang jelas, juga dukungan dari *stakeholder* yang *concern* terhadap perkembangan pariwisata khususnya. Syarat terjadinya proses tatakelola kolaboratif pariwisata

adalah partisipasi para pembuat kebijakan serta yang terpenting adalah partisipasi masyarakat (Ansell & Gash, 2008). Model pariwisata berbasis komunitas, yang juga dikenal sebagai *Community Based Tourism*, adalah suatu pendekatan di mana pemerintah daerah terlibat secara aktif dalam seluruh proses pengelolaan dan pengembangan pariwisata, mulai dari tahap awal pengembangan hingga pengoperasian destinasi tersebut.

Tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pariwisata didasarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu: 1. Pengakuan, dukungan dan pengembangan kepemilikan masyarakat pada semua sektor pariwisata. 2. Melibatkan masyarakat di semua tingkat industri pariwisata. 3. Menumbuhkan rasa bangga masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 5. Mendukung kelestarian lingkungan hidup. 6. Melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal. Memastikan distribusi manfaat yang adil kepada anggota komunitas. Dengan mengadopsi model ini, komunitas dapat mengambil peran aktif dalam mengelola pariwisata mereka sendiri, sambil memastikan bahwa manfaatnya secara merata terbagi kepada anggota komunitas tersebut.¹

Penelitian Kagungan & Yulianti, (2019) menyatakan bahwa penerapan implementasi kebijakan² pengelolaan pariwisata Kabupaten Pesawaran bertujuan untuk mencapai industri pariwisata mandiri yang berbasis kearifan lokal melalui program *one village one destination* akan berhasil jika dilakukan melalui “gerakan sadar wisata” (melibatkan partisipasi pemerintah, masyarakat desa dan seluruh *stakeholder*), serta jalinan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral termasuk membentuk *badan kerjasama antar desa* (BKAD)³. Sehingga, partisipasi aktif dari setiap elemen yang terlibat dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan pariwisata sangat penting untuk menciptakan produk wisata berkualitas dan unggulan. Jika salah satu komponen dalam industri pariwisata gagal memenuhi harapan wisatawan, tidak menutup kemungkinan citra keseluruhan produk atau

¹ UNEP and WTO. 2005. Making Tourism, Change, Impact, and Opportunities. Sumber: <http://endah-parwis-fisip.web.unair.ac.id>. Diakses : 22/02/2018

² Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), “implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (topdown) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up)”.

³ Dian Kagungan and Devi Yulianti, “The Synergy among Stakeholders to Develop Pisang Island as Marine Tourism: The Case of Underdeveloped Area,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 32, no. 1 (2019): 16.

layanan tersebut akan terpengaruh negatif. Pemerintah memiliki peran paling strategis untuk memastikan bahwa kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, kepariwisataan yang berbasis prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan menjamin diperolehnya keuntungan optimal yang dimaksud. Pentingnya peran pemerintah dalam sektor pariwisata didasari oleh keyakinan bahwa birokrasi mempunyai kekuasaan dalam menentukan segala permasalahan yang berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat suatu negara.

Birokrasi memiliki peran yang signifikan dalam mengambil langkah-langkah preventif guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dari industri pariwisata yang memiliki banyak potensi permasalahan. Namun Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya partisipasi masyarakat dan *stakeholder*. Pentingnya kolaborasi dalam pengembangan pariwisata mengingat pariwisata saat ini telah berkembang menjadi sektor yang strategis dengan keindahan alam dan keberagaman budaya yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pengembangan pariwisata merupakan rencana jangka panjang yang melibatkan *stakeholder*⁴ untuk berkontribusi dalam pengelolaan pariwisata sekaligus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan akan mampu meningkatkan potensi ekonomi, sosial dan upaya konservasi lingkungan. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata ulang berbagai hal dengan mengintegrasikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengembangan pariwisata pada dasarnya merupakan proses pencocokan dan penyesuaian berbagai aspek guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031. Terkait dengan pengembangan pariwisata, sebagai Kabupaten yang bercirikan agraris, para pemimpin di Kabupaten Lampung Barat terus berinovasi untuk menghasilkan suatu inovasi/kebaharuan. Pejabat Bupati saat ini melakukan langkah yang tidak biasa di bidang ekonomi utamanya komoditi kopi yang menjadi tumpuan mata pencaharian

⁴ Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah kelompok individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam pencapaian tujuan perencanaan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta sesuai dengan kepentingannya.

petani. Inovasi tersebut berupa festival kopi, kampoeng kopi dan sekolah kopi. Konsep yang diusung tentu tidak dalam jangka pendek berupa *output* atas suatu kegiatan semata, namun lebih *visioner* pada *outcome* atau bahkan *impactnya*. Festival kopi misalnya, telah menyadarkan *stakeholders* bahwa ada nilai besar dari suatu komoditi yang bisa diungkap lebih tinggi lagi dari sekedar acara seremonial.

Sekolah kopi merupakan contoh pendidikan vokasi berbasis komoditi kopi yang dilakukan mulai dari hulu (*on farm*) sampai dengan *off farm* di sisi hilir, semua dilakukan berbasis praktis *on site* semua dilakukan dengan *mind concept teknokratis* yang telah disusun sebelumnya. Kampoeng kopi digagas sebagai sebuah *logical frame work* membangun desa tertinggal dengan konsep agrowisata berbasis komoditi unggulan dalam hal ini kopi robusta yang diintegrasikan dengan budaya lokal. Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, jumlah wisatawan Nusantara dan mancanegara pada Oktober 2021 sebanyak 93.608 orang. Saat ini, Agrowisata Kampoeng Kopi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lampung Barat. Terletak di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, wilayah Rigis Jaya diakui sebagai produsen kopi terbaik di Lampung Barat.

Gambar 1. Data Kunjungan Wisatawan Pariwisata Lampung Barat 2013-2021



Sumber: Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, 2023

Kawasan Agrowisata Kampoeng Kopi di Rigis Jaya memiliki peran ganda sebagai destinasi wisata yang menarik dan pusat edukasi bagi masyarakat tentang pengelolaan kopi, mulai dari tahap pembibitan hingga produk jadi. Selain itu, Rigis Jaya juga terkenal sebagai desa digital dan menjadi satu-satunya desa wisata di

Provinsi Lampung yang berhasil meraih peringkat kedua dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, khususnya dalam kategori desa rintisan.

Pengembangan agrowisata⁵ kampoeng kopi sangat bergantung pada peran stakeholder dalam prosesnya. Stakeholder ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan pariwisata di Pekon Rigis Jaya. Tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah kurang optimalnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat, sehingga mereka perlu meningkatkan upaya pembangunan pariwisata yang ada. Saat ini, Dinas Pariwisata Lampung Barat telah mengelola 39 objek wisata melalui kelompok sadar wisata. Jumlah kunjungan wisatawan ke agrowisata kampoeng kopi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 1 Data Kunjungan Wisatawan Ke Agrowisata Kampoeng Kopi Rigis Jaya Tahun 2019-2023

No	Bulan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Januari	2.520	2.998	820	512	870
2.	Februari	1.529	698	200	769	806
3.	Maret	1.156	0	0	578	779
4.	April	786	0	0	763	767
5.	Mei	502	0	0	623	532
6.	Juni	3.456	0	0	490	866
7.	Juli	440	1.334	104	430	590
8.	Agustus	540	700	458	632	563
9.	September	335	396	5.234	980	878
10.	Oktober	660	230	230	645	398
11.	November	440	324	324	653	810
12.	Desember	330	672	672	1060	500
Jumlah		12.694	7.352	8.042	8.135	8.359

Sumber: Kelompok Sadar Wisata Agrowisata Kampoeng Kopi Rigis Jaya, 2023

Berdasarkan data rekapitulasi terbaru dari ketua Pokdarwis Agrowisata Kampoeng Kopi Rigis Jaya data kunjungan wisatawan tahun 2023 berjumlah 8.359 orang. Tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah meningkatkan pembangunan pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang masih belum

⁵ Yoeti (2000) Agrowisata merupakan salah satu alternatif potensial untuk dikembangkan di daerah pedesaan. Ruang lingkup dan batasan mengenai agrowisata dijelaskan bahwa agrowisata adalah suatu jenis pariwisata yang khusus menjadikan hasil pertanian, peternakan, perkebunan sebagai daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung.

optimal. Saat ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat telah mengelola 39 objek wisata yang tergabung dalam kelompok sadar wisata.

Aktor Hepta Helix memiliki peran yang penting dalam pengembangan sektor agrowisata di Kampoeng Kopi Rigin Jaya. Dari aspek pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pengembangan diri, agrowisata dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sosial ekonomi di wilayah Kampoeng Kopi tersebut. Jika seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama secara efektif dalam mengembangkan destinasi agrowisata, diharapkan akan terwujud agrowisata yang lebih baik di Kampoeng Kopi dan sekitarnya, termasuk kawasan wisata yang ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020), ditemukan bahwa kolaborasi antar aktor Pentahelix dalam pengembangan agrowisata Kampoeng Kopi di Pekon Rigin Jaya masih terbatas pada beberapa pelaku saja dan cenderung dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukannya regulasi yang mengatur kerjasama antar pelaku dalam pengembangan sektor pariwisata, mengingat sektor ini berperan penting dalam kontribusi anggaran nasional dan peningkatan pendapatan daerah. Perhatian juga perlu diberikan pada infrastruktur dan fasilitas yang ada, serta memanfaatkan peran UMKM dengan melakukan pembinaan dan pengembangan produk unggulan yang ada⁶.

Selanjutnya hasil penelitian Kagungan (2020) menyimpulkan dan memberikan rekomendasi sebagai berikut: kebijakan penatakelolaan dan pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung cenderung berjalan sendiri-sendiri dan belum ada tema sentral yang memiliki daya tarik yang sesuai untuk dijual, termasuk upaya lebih maksimal dalam melakukan promosi⁷. Oleh karena itu perlunya jalinan kerjasama yang sinergis antar aktor, di bentuknya forum kerjasama yang mewadahi kolaborasi tersebut, dan adanya “payung hukum” yang menaunginya serta pelibatan *Non Government Organisation* (NGO) dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Berbagai aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi (Heptahelix) memiliki kontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-

⁶ Lestari Fitria, Skripsi, “Sinergitas Aktor Pentahelix Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata Berbasis Agrowisata Kampoeng Kopi,” 2020.

⁷ Dian Kagungan et al., “Research in Business & Social Science Governments’ Approach on Marine Tourism Industry Policy,” *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478) 9, no. 7 (2020): 197–203.

masing dalam Kotler *et all* (2004) menyatakan bahwa kolaborasi aktor Pentahelix dalam pengembangan pariwisata dari beberapa riset/kajian menyimpulkan belum berjalan optimal⁸.

Pada penelitian ini, penulis menawarkan pengembangan konsep helix yang telah ada yakni konsep *Hepta helix*. Konsep Hepta Helix menawarkan lebih banyak kolaborasi dibandingkan konsep Pentahelix, yaitu partisipasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang pariwisata dan partisipasi generasi muda/millennials. Konsep Hepta helix sendiri menempatkan aktor-aktor sebagai berikut: *Government* sebagai regulator, *Academic* sebagai *konseptor*, *Bussiness* sebagai investor, *Local Community* sebagai operator, *Media* sebagai promosi, *Non Government Organization* sebagai educator serta keterlibatan *Milenial*/kalangan muda sebagai *konsumen dan promosi*. Konsep *Heptahelix* akan membuktikan bahwa pengembangan pariwisata menjadi suatu teori baru/konsep baru setelah *Pentahelix*.

Salah satunya adalah peran para pemangku kepentingan (*NGO/LSM*) dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan kebijakan pariwisata Indonesia melalui kegiatan pemberdayaan. Keterlibatan *NGO* diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kagungan (2021) menyatakan bahwa “kesuksesan” pemberdayaan masyarakat di Pulau Pahawang dilakukan pula oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala yang berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya, hingga Pulau Pahawang dikenal luas sampai dengan saat ini sebagai salah satu kawasan wisata bahari unggulan Kabupaten Pesawaran⁹. Hasil penelitian lainnya kebijakan kolaboratif tata kelola pariwisata yang juga melibatkan Pemerintah, PT/Akademisi, dan Masyarakat di Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus serta peran Lembaga Swadaya Masyarakat Cinta Kepada Alam (Cikal) hingga pada akhirnya menjadikan Teluk Kiluan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Tanggamus yang telah dikenal sampai manca negara.

Sebagai sebuah konsep baru, penerapan konsep *Heptahelix* masih banyak ditemukan *gap* antara kajian teoritis (*Triple helix, Quintuple Helix, Pentahelix*)

⁸ Aflit Nuryulia Praswati, “Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi,” in *Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis : Perkembangan Konsep Dan Riset E-Business Di Indonesia*, 2017, 690–705.

⁹ Kagungan, D., Duadji, N., & Meutia, I. F. (2021, December). Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran Regency. In *2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021)* (pp. 295-301). Atlantis Press.

dengan praktik dalam penerapan *helix-helix tersebut*. Gagasan tentang pengembangan desa wisata “kampoeng kopi” dan penguatan peran kelompok sadar wisata berbasis *Heptahelix of millenials of agrotourism* merupakan gagasan yang benar-benar baru yang kami tawarkan dalam rangka pengembangan “*kampoeng kopi*” Pekon Rigin Jaya dan penguatan peran kelompok sadar wisata di kawasan pedesaan di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat yang menjadi lokasi penelitian ini. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, *smart village* dapat menjadi salah satu model alternatif dalam pembangunan kawasan pedesaan yang dapat diterapkan. Konsep *smart village* dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini penting mengingat bahwa kebijakan terkait pembangunan kawasan pedesaan di Indonesia baru diperkenalkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dengan demikian, konsep *smart village* dapat disesuaikan dengan konteks dan kebijakan pembangunan di kawasan pedesaan Indonesia, sebagai solusi untuk menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan pembangunan di daerah tersebut¹⁰. Menurut Herdiana (2019), konsep *smart village* untuk konteks pembangunan kawasan di Indonesia dapat dikembangkan melalui tiga pilar utama, yaitu *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*.

Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat pentingnya kolaborasi dalam pengembangan pariwisata saat ini telah berkembang menjadi sektor yang strategis dengan keindahan alam dan keberagaman budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan dari dalam negeri maupun mancanegara. Pengembangan pariwisata merupakan rencana jangka panjang yang melibatkan *stakeholder* untuk berkontribusi dalam pengelolaan pariwisata sekaligus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan akan mampu meningkatkan potensi ekonomi, sosial dan upaya konservasi lingkungan. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata ulang berbagai hal dengan mengintegrasikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

¹⁰ *Smart Village* adalah Desa yang menerapkan teknologi tepat guna untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan ekonomi
“Herdiana, D. (2019). *Pengembangan Konsep Smart Village bagi Kalurahan-Kalurahan di Indonesia*. Iptek-Kom, 21(1)

Pengembangan pariwisata pada dasarnya merupakan proses pencocokan dan penyesuaian berbagai aspek guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berkaitan dengan topik disertasi ini, penulis mengambil judul “Kolaborasi Aktor Heptahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis *Smart Village* Di Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat”.

Yoeti, (1996) mendeskripsikan bahwa untuk mengembangkan kawasan wisata harus menciptakan konsep yang berkaitan dengan daya tariknya, perbedaannya dari objek wisata lain, fasilitas wisata yang memadai, akomodasi dan fasilitas transportasi, telekomunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya, pembangunan pariwisata dapat dikatakan seimbang; ini karena pengembangan tidak hanya terfokus pada satu objek tertentu, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek seperti transportasi, komunikasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Tentu saja, hal ini didukung oleh kolaborasi antar aktor yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan pariwisata¹¹.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Praswati (2017), dapat ditarik kesimpulan bahwa inovasi memainkan peran sentral dalam membentuk daya saing dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Konsep inovasi ini umumnya dikenal dengan istilah "helix".¹² Menurut konsep helix yang dikemukakan oleh Carayannis dan Campbell (2009), keterlibatan yang cerdas, efektif, dan efisien antara kebijakan pemerintah, universitas, industri, dan masyarakat sipil sangatlah penting¹³. Secara sejajar, Model *Quadruple Helix* dikembangkan dengan mempertahankan interaksi dari lingkungan *Triple Helix*, yang melibatkan universitas, industri, dan pemerintah, dan mengakui peran penting masyarakat sipil¹⁴.

Peran yang sangat penting dari akademisi dan perusahaan terletak dalam penciptaan kondisi yang mendukung terbentuknya ekosistem inovasi yang terkoordinasi. Sementara itu, tugas pemerintah mencakup penyediaan kerangka

¹¹ Oka A Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1996).

¹² Praswati, “Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi.”

¹³ Elias G Carayannis and David V J Campbell, “Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem,” *International Journal of Technology Management* 46, no. 3–4 (2009): 201–234.

¹⁴ Robert M. Yawson, “The Ecological System of Innovation: A New Architectural Framework for a Functional Evidence-Based Platform for Science and Innovation Policy,” in *The Future of Innovation: Proceedings of the XX ISPIM 2009 Conference, Vienna, Austria, June 21-24, 2009*, 2009, 1–16.

peraturan dan dukungan finansial untuk merumuskan serta menerapkan strategi dan kebijakan inovasi. Peran masyarakat sipil tidak terbatas hanya sebagai pengguna dan pelaksana pengetahuan, tetapi juga mencakup partisipasinya secara aktif dalam sistem inovasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran penting sebagai pendukung partisipasi masyarakat sipil secara *bottom-up*. Konsep *Quadruple Helix* melibatkan baik masyarakat sipil (MS) maupun masyarakat berbasis media dan budaya (MMB). Konsep ini semakin berkembang dengan adanya *Quintuple Helix*, yang melibatkan aktor Masyarakat dari Lingkungan Alami (MLA).

Konsep *Pentahelix*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Tujuan dari konsep ini adalah menciptakan dan mempertahankan standar tinggi dalam kegiatan pariwisata, infrastruktur, dan layanan, sambil memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan, merupakan suatu prioritas.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan optimalisasi peran pengusaha, pemerintah, komunitas, akademisi, dan media sebagai pendorong dalam kerangka sistem pariwisata. Dalam pengembangan agrowisata, kolaborasi model *Pentahelix* yang diperkenalkan oleh Menteri Pariwisata, Arif Yahya, memiliki peran penting dalam memajukan sektor pariwisata di suatu daerah; dalam regulasi tersebut diungkapkan bahwa untuk menciptakan proses bisnis yang optimal dan menjamin kualitas kegiatan, fasilitas, dan layanan pariwisata, serta memberikan pengalaman dan manfaat yang positif bagi masyarakat dan lingkungan, diperlukan optimisasi melalui peran *Academic, Business, Community, Government*, dan Media (ABCGM).

Gagasan tentang pengembangan kawasan desa wisata “*kampoeng kopi*” Riris Jaya berbasis *Heptahelix of millennials of agrotourism* merupakan gagasan yang benar-benar baru yang penulis tawarkan dalam penelitian disertasi ini, yakni dalam rangka pengembangan desa wisata dan penguatan peran kelompok sadar wisata Pekon Riris Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat karena lembaga inilah yang menjadi ujung tombak pengembangan pariwisata. *Heptahelix of*

millenials of agrotourism (kolaborasi yang sinergis antar *stakeholder* yang terdiri dari Pemerintah Daerah beserta DPRD, Pengusaha, Perguruan Tinggi, Masyarakat lokal, Media dan *NGO/LSM/pegiat* wisata serta milenial).

Menurut hasil penelitian Kagungan et al. (2020), ide tentang kaum muda sebagai penikmat wisata (*millennials*) muncul dengan adanya pemahaman bahwa generasi muda memiliki minat untuk menjelajahi destinasi pariwisata¹⁵. Konsep *Pentahelix* yang kita kenal selama ini hanya menawarkan kolaborasi Pemerintah Daerah, Investor, Perguruan Tinggi/Akademisi, Masyarakat Lokal dan Media, sementara konsep *Heptahelix* menawarkan kolaborasi yang lebih dari konsep *Pentahelix* yakni ada keterlibatan *NGO (Non Government Organisation)/Lembaga Swadaya Masyarakat/pegiat* wisata dan keterlibatan kaum millennial. Konsep *Heptahelix* sendiri menempatkan aktor-aktor sebagai berikut: *Government* sebagai *regulator*, *Academic* sebagai *konseptor*, *Bussiness* sebagai *investor*, *Local Community* sebagai *operator*, *Media* sebagai *promosi*, *Non Government Organization/NGO* sebagai *educator* serta keterlibatan *Milenial/kalangan* muda sebagai *consumer dan promosi*. Untuk mewujudkan hal tersebut, peneliti juga menggagas pembentukan Forum Bersama Desa Wisata yang keberadaannya dikuatkan dengan payung hukum kebijakan agar sinergitas/kolaborasi aktor *Heptahelix* berjalan secara berkelanjutan.

Smart Village adalah suatu konsep yang berasal dari konsep *Smart City*. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pemerintahan, terutama di tingkat desa. Para ahli memahami *Smart Village* sebagai integrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat di pedesaan, dengan tujuan untuk menciptakan manfaat dan keberlanjutan antara teknologi informasi dan masyarakat di pedesaan. Menurut Herdiana, Dian (2019), ada beberapa konstruksi dari pembentuk *Smart Village*. Dalam implementasi *Smart Village*, terdapat tiga dimensi yang menjadi dasar utama, yaitu sumber daya, institusi, dan teknologi. Konstruksi *Smart Village* didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu *Smart Government*, *Smart Community*, dan *Smart Environment*.

Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dan pendekatan untuk mencapai target

¹⁵ Kagungan et al., "Research in Business & Social Science Governments ' Approach on Marine Tourism Industry Policy."

pengembangan *smart village*, yang melibatkan penciptaan hubungan yang konstruktif ("*smart relationship*"). Melalui interaksi antara ketiga unsur dalam *smart village* tersebut, hasil yang diperoleh adalah sinergi antara elemen-elemen *smart village* yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, *outcome* yang diharapkan adalah peningkatan produktivitas dari ketiga elemen *Smart Village* tersebut¹⁶. Sedangkan menurut *Susanto dan Aziiza (2020)* Program *Smart Village* yang diusulkan terdiri dari enam dimensi: 1) Pemerintahan atau Tata Kelola, 2) Teknologi, 3) Sumber Daya, 4) Layanan Desa, 5) Kualitas Hidup, dan 6) Pariwisata¹⁷.

1.2 Perumusan Masalah

Kolaborasi aktor Heptahelix yang digagas dalam penelitian ini memegang peranan penting bagi keberhasilan pengembangan agrowisata berbasis *Smart Village*. Perlu melihat agrowisata tidak hanya dari perspektif internal (masyarakat lokal) tetapi juga dari perspektif pemangku kepentingan eksternal (wisatawan terutama wisatawan lokal yang didominasi kaum muda/*millennial*). Inovasi pengembangan agrowisata yang berhasil, tidak bisa dilakukan secara parsial, harus ada kerjasama antara akademisi, pengusaha, masyarakat, pemerintah, media, *NGO* dan *millenials* sebagai penikmat pariwisata. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama, yaitu; Bagaimanakah kolaborasi aktor Heptahelix dalam pengembangan pariwisata di Pekon Rigis Jaya Kabupaten Lampung Barat ?

Bagaimanakah penerapan *smart village* baik meningkatkan layanan publik maupun meningkatkan pengembangan Agrowisata Kampong Kopi di Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kolaborasi antarsubstistem dalam kajian inovasi Heptahelix (pemerintah, industri, perguruan tinggi, masyarakat sipil, media, *NGO* dan

¹⁶ Dian Herdiana, "Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages," *Iptek-Kom* 21, no. 1 (2019): 1–16.

¹⁷ A. A. Aziiza and T. D. Susanto, "The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency)," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 722, no. 1 (2020).

millennial) yaitu *Government* sebagai *regulator*, *Academic* sebagai *konseptor*, *Bussiness* sebagai *investor*, *Local Community* sebagai *Operator*, *Media* sebagai *promosi*, *Non Government Organization* sebagai *educator* serta keterlibatan *Milenial*/kalangan muda sebagai *Consumer* dan *promosi* dalam kajian kebijakan pengembangan desa wisata “kampoeng kopi” Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat .

2. Menghasilkan “konsep baru” *Heptahelix* dalam kebijakan pengembangan pariwisata berbasis *Smart Village*
3. Hasil kegiatan penelitian ini dipublikasikan pada jurnal internasional terindex scopus

Secara praktis

Aspek penting lain yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Penerapan contoh desa inovatif berbasis pendekatan *top-down & bottom-up*. Penelitian ini akan menyajikan tahapan pengembangan desa inovatif sebagai *lesson learn* dari “kesuksesan” inovasi Desa/pekon Rigis Jaya dalam pelaksanaan *Smart Village*. Kelembagaan desa/*leadership* dan partisipasi masyarakat memegang peran krusial dalam proses inisiasi program inovasi desa.
2. Desa secara mandiri dituntut untuk mampu menyusun peta jalan perencanaan pembangunan desa sesuai arah kebijakan/program prioritas desa sebagai mana diamanatkan Kementerian Desa. Sinergitas yang solid antar aktor-helix dan penguatan jejaring kerja sangat diperlukan dalam pengembangan inovasi desa yang diharapkan berdampak pada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
3. Memperkokoh sinergitas Badan Kerjasama Antar Pekon/Desa yang telah dibentuk tanggal 5 Oktober 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi keilmuan matakuliah kajian Studi Pembangunan khususnya melalui penerapan konsep *heptahelix of millenials of agrotourism* dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata unggulan “kampoeng kopi” Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat

2. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait kolaborasi aktor Heptahelix dalam Pengembangan pariwisata berbasis *Smart Village* yang di harapkan dapat menjadi pilot *project* pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Modal Sosial

Hanifah menyatakan sifat-sifat seperti kemauan baik, persahabatan, simpati dan kekerabatan merupakan bentuk modal sosial yang dapat membentuk kelompok sosial (Syahra, 2003). Dengan demikian, berbagai aspek modal sosial, seperti kepercayaan (*trust*), nilai-nilai, norma(*norms*), jaringan sosial (*social network*), aktivisme dan timbal balik (*reciprocity*) yang dijelaskan sebelumnya, menjadi faktor penting dalam pengembangan objek wisata CBT. Hal ini disebabkan oleh efektifitas modal sosial pemerintah kota dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata CBT sesuai konsep yang diusulkan¹⁸. Putnam *et all*, (2004), Yulianto, (2015) (Purwanto & Hastanti, 2019). (Perguna, dkk 2019) (Hwang, D., & Stewart, W. P 2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang tercermin dalam modal sosial merupakan faktor pendukung utama pengembangan desa wisata¹⁹.

Berdasarkan pendapat yang dikutip oleh (James S. Coleman dkk., (2011) Field, (2010). Vipriyanti, (2011) Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat untuk mencapai tujuan ditopang oleh kepercayaan, jaringan, nilai dan norma. Selanjutnya Pitana & Gayatri (2005) menyatakan aktor-aktor yang berkontribusi menggerakkan sistem pariwisata anatra lain adalah masyarakat, pihak swasta dan pemerintah. Modal sosial merupakan aset, untuk melakukan tindakan kolektif yang saling menguntungkan, modal sosial merupakan basis keterlibatan masyarakat dalam pembangunan termasuk pembangunan pariwisata. Grootaert & Van Bastelaer (Fukuyama ,1995).

¹⁸ Syahra, R. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1).

¹⁹ Mega Sesotyaningtyas and Asnawi Manaf, "Analysis of Sustainable Tourism Village Development at Kutoharjo Village , Kendal Regency of Central Java," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 184, no. August 2014 (2015): 273–280, <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.091>.

2.2. Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi berasal dari bahasa Latin "*collaborare*," yang berarti "bekerja sama" (Merriam-Webster). Menurut *The American Heritage Dictionary* (2000), kolaborasi didefinisikan sebagai tindakan bekerja sama., terutama dalam upaya mengintegrasikan ide. Konsep ini sejalan dengan gagasan yang telah dijelaskan²⁰ yang menyatakan bahwa: "*Collaboration is a process through which parties, each with unique perspectives on a problem, can constructively explore their differences and seek solutions that surpass their individual, limited visions of what is possible*".

Wood & Gray, 1991: 5 dan Thomson & Perry, (2006: 23) Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai jalinan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan, bertujuan untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Selanjutnya (Chriss Ansell & Alison Gash, 2007) dan Chriss Ansell & Alison Gash, (2007: 544) mendefinisikan kolaborasi sebagai lembaga publik yang bekerjasama dengan stakeholder berorientasi pada kesepakatan bersama dalam rangka implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan merujuk pada kutipan tersebut, Kolaborasi dapat diartikan sebagai kemitraan yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk berbagi tanggung jawab, izin, dan akuntabilitas, dengan tujuan mencapai hasil dan tujuan bersama²¹, definisi kolaborasi mencakup suatu proses di mana entitas yang mandiri berinteraksi melalui negosiasi, baik yang bersifat formal maupun informal, untuk bersama-sama merumuskan aturan dan struktur yang mengatur hubungan dan tindakan, serta untuk mengambil keputusan mengenai isu-isu yang memerlukan kerjasama. Ini mencerminkan interaksi yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dan manajemen melibatkan kerjasama antara individu, melintasi batas-batas lembaga publik, tingkatan pemerintahan, serta sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, dengan niat mencapai hasil yang bersama-sama diinginkan. Kebijakan dan manajemen

²⁰ Donna J Wood and Barbara Gray, "Toward a Comprehensive Theory of Collaboration," *The Journal of Applied Behavioral Science* (1991).

²¹ Ann Marie Thomson and James L Perry, "Collaboration Processes: Inside the Black Box," *Public Administration Review* 66, no. 1 (2006): 20–32.

publik, proses dan struktur pengambilan keputusan melibatkan masyarakat dengan cara yang bersifat konstruktif, kolaborasi terjadi melibatkan seluruh lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau sektor publik, swasta, serta masyarakat sipil, dengan tujuan mencapai hasil bersama. Konsep pemerintahan kolaboratif diperkuat oleh proses kolaborasi berkelanjutan, di mana komitmen melalui komunikasi, motivasi bersama yang mencakup kepercayaan, komitmen, dan saling menguntungkan, serta kemampuan untuk bertindak bersama (administrasi) saling memperkuat satu sama lain secara positif. Proses ini terjadi melalui siklus umpan balik, yang meningkatkan kualitas dan dinamika dari kolaborasi. Menurut Carpenter (1990) dalam buku yang diterbitkan oleh WWF, terdapat tujuh karakteristik utama dari kolaborasi, yang meliputi:

1. Partisipasi bersifat inklusif dan non-hierarkis.
2. Partisipasi membawa tanggung jawab dalam mencapai kesuksesan.
3. Terdapat tujuan yang jelas dan definisi masalah.
4. Partisipan saling berbagi pengetahuan (*educating each other*).
5. Identifikasi dan pengujian berbagai pilihan dilakukan.
6. Partisipan berbagi peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan solusi.
7. Partisipan selalu mendapat informasi tentang perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai makna kolaborasi, dalam konteks penelitian ini, kolaborasi merujuk pada kerjasama antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang saling bergantung satu sama lain untuk membuat keputusan bersama diambil untuk mencapai tujuan bersama dalam kerangka kolaboratif ini. Dalam bentuk kerjasama ini, setiap pihak yang terlibat menjalin hubungan yang kuat, berkomunikasi secara intensif, dan sering kali melintasi batas organisasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kolaborasi dalam konteks penelitian ini, dimensi dan komponen yang membentuk kolaborasi tersebut akan dijelaskan secara rinci.

2.3 Komponen-komponen Kolaborasi

Kegiatan kolaborasi, terdapat faktor-faktor kunci yang menjadi penentu keberhasilan kerjasama. Elemen-elemen ini saling mendukung satu sama lain,

sehingga keseluruhan kolaborasi dapat mencapai keberhasilan ketika semua elemen tersebut terpenuhi. Menurut pendapat Grey (1989), Kolaborasi ini mencakup beberapa unsur: (1) saling mendukung, (2) menyatukan ide-ide konstruktif untuk mencapai solusi, (3) kepemilikan atas keputusan bersama (*joint ownership of decisions*), dan (4) Tanggung jawab bersama merupakan elemen penting dalam kolaborasi. Sebuah perspektif lain disampaikan oleh Roberts dan Bradley (1991), yang menyatakan bahwa unsur-unsur kunci kolaborasi melibatkan tujuan transmutional (penyatuan tujuan), keanggotaan yang bersifat tetap dan sukarela, struktur organisasi, proses interaktif, dan sifat-sifat sementara²². Kolaborasi memerlukan strategi yang melibatkan tiga modal, yaitu modal sosial yang mencakup kepercayaan, komunikasi, dan keterbukaan untuk pertukaran ide; modal intelektual yang melibatkan pemahaman dan pengetahuan; dan modal politik yang mencakup perjanjian dan proyek formal maupun informal. Tiga komponen kolaborasi menurut Robert Agranoff dan Michael McGuire (2003), lima aspek kolaborasi menurut Thomson dan Perry (2006), lima komponen kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007), serta lima komponen menurut Roberts et al. (2016).

a.) Robert Agranoff dan Michael McGuire

Agranoff dan McGuire (2012: 144-153) mengkonseptualisasikan kolaborasi sebagai serangkaian kegiatan yang bersifat horisontal dan vertikal. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut dianalisis melalui komponen-komponen berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang intensif memiliki peran penting dalam konteks kerja sama. Kolaborasi dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan komunikasi tidak langsung dapat terfasilitasi melalui bantuan teknologi. Komunikasi melalui teknologi menjadi lebih efektif dalam situasi kolaboratif, terutama ketika konflik timbul di antara para pelibat.

2. Nilai tambah

Nilai-nilai yang dimaksud mencakup berbagai aspek nilai publik yang

²² Ibid.

terkait dengan efisiensi, demokrasi dalam struktur dan proses lembaga, serta kerjasama. Tantangan dalam menciptakan nilai publik melibatkan perbedaan dalam tingkat kepentingan, urgensi, dan cakupan isu yang melibatkan berbagai sektor. Hal ini memberi pemahaman bahwa pemerintah sendiri tidak memiliki kapasitas untuk menciptakan elemen-elemen krusial dari nilai publik tersebut (Muqorrobin, 2016: 41). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan pihak non-pemerintah guna mencapai hal tersebut.

2. Deliberasi

Deliberasi adalah suatu keunggulan dari kolaborasi yang menciptakan kesempatan untuk saling belajar secara saling menguntungkan (*mutual learning*), membangun komunitas, dan memanfaatkan proses interaktif.

b.) Ann Marie Thomson dan James L. Perry

Dimensi merujuk pada kumpulan komponen yang membentuk suatu konsep dan memiliki saling ketergantungan antar komponennya (Mustafa, 2009). Dalam tulisannya yang berjudul "*Collaboration Processes: Inside The Black Box*", Thomson dan Perry (2006: 24-28) menyampaikan bahwa ada lima aspek utama kolaborasi :

1. Dimensi Tata Pemerintahan (*The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension*)

Dimensi pemerintahan berkaitan dengan implementasi pengambilan keputusan bersama, pengaturan pembagian kekuasaan, dan penyelesaian masalah. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam dimensi pemerintahan ini mencakup: (1) menghindari dominasi struktur hierarki dan kewenangan; (2) menyadari bahwa pihak yang terlibat dalam kerjasama memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap pencapaian kesepakatan, tetapi juga terhadap pengambilan keputusan yang tepat; (3) mengakui bahwa setiap pihak yang berkolaborasi memiliki kepentingan yang sah, sehingga hasilnya mencerminkan kesepakatan kelompok, bukan dominasi koalisi atau kekuatan politik; dan (4) memahami bahwa pemerintah menunjukkan transparansi informasi, menghormati pandangan pihak lain, dan melalui proses negosiasi yang memerlukan waktu yang cukup untuk mencapai kesepakatan.

2. Dimensi Administrasi (*The Process of Collaborative: The Administration Dimension*)

Dimensi administrasi dalam kolaborasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Struktur administrasi dalam konteks kolaborasi menempati posisi sentral dalam mengoordinasikan komunikasi, mengorganisir, dan menyebarkan informasi, serta berupaya bersama-sama mengatur interaksi antara pihak-pihak yang berkolaborasi, yang disebut sebagai "sosial koordinasi" oleh Freitag dan Winkler. Indikator dalam dimensi administrasi mencakup kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pelibat, efektivitas pertemuan kolaboratif, kejelasan tujuan, tugas-tugas yang terkoordinasi dengan baik, adanya saluran komunikasi formal, dan pemantauan pelaksanaan kolaborasi²³.

3. Dimensi Otonomi (*The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension*)

Dimensi otonomi menunjukkan hubungan yang bertentangan antara kontrol bersama dan kontrol individu²⁴. Dalam konteks kolaborasi, pelibat aktif menjaga identitas mereka melalui pemeliharaan kontrol pribadi. Kontrol bersama melibatkan kesiapan mitra untuk berbagi informasi, tidak hanya terkait dengan operasi organisasi masing-masing, tetapi juga terkait dengan batasan-batasan yang ada dalam kolaborasi. Dimensi otonomi berusaha menggambarkan ketegangan yang tersirat antara kepentingan individu aktor dan kepentingan bersama. Indikator-indikator dalam dimensi otonomi ini terkait dengan sejauh mana para aktor menganggap kolaborasi sebagai potensi penghambat bagi misi organisasi mereka, kepercayaan bahwa keuntungan individu mereka dipengaruhi oleh kolaborasi, dan kesadaran para aktor dalam upaya memenuhi harapan organisasi dan para aktor lainnya dalam konteks kolaborasi tersebut.

²³ Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006), "Collaboration Processes: Inside the Black Box" *Public administration review*, 66, 20-32

²⁴ Wood, D.J., & Gray, B. (1991) "Toward a Comprehensive Theory of Collaboration." *The Journal of applied behavior science*, 27 (2), 139-162.

4. Dimensi Mutualitas (*The Process of Forging Mutually Beneficial Relationship: The Mutuality Dimension*)

Dimensi mutualisme bersandar pada saling ketergantungan di dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, penting bagi suatu entitas organisasional untuk mengalami tingkat ketergantungan yang seimbang, termasuk dalam situasi persamaan dan perbedaan kepentingan. Powell (1990) merujuk pada konsep ini sebagai "saling melengkapi", mengindikasikan bahwa meskipun organisasi mungkin memiliki agenda dan kepentingan yang berbeda, mereka dapat saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Komplementaritas merujuk pada situasi di mana suatu organisasi rela mengorbankan haknya demi memperoleh sumber daya dari organisasi lain demi mencapai kepentingan yang dimilikinya. Dalam kerja sama, keberhasilan hubungan antar pemangku kepentingan sangat bergantung pada adanya saling ketergantungan yang efektif.

5. Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik (*The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension*)

Kegiatan kolaborasi, setiap pihak akan menunjukkan keterlibatannya secara aktif asalkan pihak lain yang terlibat juga menunjukkan kesediaan serupa. Keterkaitan ini akan membentuk kepercayaan antar pihak yang berkolaborasi melalui interaksi yang berulang. Adanya kepercayaan tersebut membawa berbagai manfaat bagi kelangsungan kerjasama, antara lain: (1) terciptanya niat baik, di mana pihak-pihak yang terlibat akan bersikap sesuai dengan komitmen yang diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung; (2) menjaga integritas dalam setiap tahap perundingan yang sedang berlangsung; (3) memastikan bahwa pihak-pihak yang berkolaborasi tidak mencari keuntungan yang berlebihan meskipun ada peluang untuk hal tersebut. (Cummings dan Bromiley, 1993).

c.) Chris Ansell dan Alison Gash

Ansell dan Gash menyatakan bahwa kolaborasi melibatkan elemen-elemen yang saling membentuk siklus dan saling memengaruhi satu sama lain (Chris Ansell & Alison Gash, 2007, hal. 558–561). Elemen-elemen tersebut

mencakup pertemuan langsung dan pembentukan saling kepercayaan, dengan argumen sebagai berikut :

1. Dialog antar-muka (*face to face dialogue*)

Dialog interaktif tatap muka memainkan peran krusial dalam konteks kolaborasi sebagai bentuk komunikasi, terutama dalam upaya mencapai kesepakatan bersama. Penerapan komunikasi tatap muka secara langsung diambil sebagai langkah strategis untuk mengurangi stereotip (pandangan negatif terhadap pihak lain) dan memperkuat rasa saling menghormati di antara para aktor yang terlibat. Dengan melibatkan komunikasi langsung, peserta kolaborasi memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan lebih obyektif.

2. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Pembangunan kepercayaan memerlukan investasi waktu yang substansial, terutama karena dalam kerangka kolaboratif, diperlukan komunikasi yang intens dan berkesinambungan, selain penyesuaian dengan kondisi saat ini yang mungkin terkait dengan konflik masa lalu (*prehistory antagonism*). Ansell dan Gash mengemukakan argumentasinya sebagai berikut:

“If the prehistory is highly- antagonistic, then policy makers or stakeholders should budget time for effective remedial trust building. If they cannot justify the necessary time and cost, then they should not embark on a collaboration strategy²⁵”. Para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan atau sebagai pemangku kepentingan perlu menginvestasikan waktu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya membangun kepercayaan dengan efektif. Jika tidak, maka sebaiknya pertimbangan untuk melanjutkan kolaborasi dilakukan.

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Beberapa faktor yang memengaruhi komitmen melibatkan

²⁵ Chriss Ansell & Alison Gash, “Collaborative Governance in Theory and Practice,” *Journal of Public Administration Research and Theory* 8, no. 4 (2007).

(1) pengakuan saling atau *mutual recognition*, yang mencakup pengakuan bersama; (2) apresiasi bersama atau *joint appreciation* dari para pelaku; (3) kepercayaan di antara pelaku; (4) rasa memiliki pada proses atau *ownership the process*, yang terkait dengan pengaruh setiap pelaku dalam pengambilan keputusan namun dihadapkan pada dilema kompleksitas kolaborasi; (5) ketergantungan saling antar pelaku atau *interdependence*. Perbedaan kapasitas di antara pelaku menciptakan ketergantungan yang dapat menimbulkan dan memperkuat komitmen.

4. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pentingnya dalam mencapai tujuan bersama ditekankan melalui pemahaman bersama, yang dapat diartikan sebagai *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama). Pemahaman bersama ini mencakup penyatuan pemikiran dan kesesuaian tujuan, bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman di antara para pelaku.

5. Dampak sementara (*intermediate outcomes*)

Dampak yang bersifat sementara timbul selama proses kolaborasi berlangsung, sehingga istilah "sementara" digunakan dalam konteks ini. Dampak sementara ini menciptakan respons atau umpan balik. Respons yang diharapkan adalah yang positif, dikenal sebagai "kemenangan kecil" atau yang disebut sebagai *temporal property* oleh Roberts dan Bradley (1991). Kemenangan kecil tersebut mampu meningkatkan harapan setiap pelaku dalam kolaborasi, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan dan komitmen.

d.) Debbie Roberts, Rene van Wyk, dan Nalesh Dhanpat

Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh (Roberts et al., 2016, pp. 4–6) yang berjudul “*Exploring Practices for Effective Collaboration*” terdapat lima kunci kolaborasi, yakni :

1. Tujuan Umum (*common purpose*)

Kunci dalam kolaborasi adalah adanya visi bersama, yang memotivasi para pelaku untuk tetap bersatu dalam mencapai tujuan tersebut.

2. *Mutualitas (mutuality)*

Mutualitas terjadi ketika setiap pihak memberikan kontribusi sumber daya, menghasilkan manfaat bagi pihak lain, seperti dalam saling pertukaran informasi. Kesamaan dalam misi, budaya, dan komitmen terhadap tujuan kolaborasi berperan dalam memudahkan pertukaran sumber daya.

3. *Lingkungan yang memungkinkan (enabling environment)*

Lingkungan kolaboratif mencakup lingkungan kerja dan pola kepemimpinan dari pemimpin kolaboratif. Pengaruh yang signifikan terdapat pada kinerja para pelaku dalam menjalankan kolaborasi yang ditentukan oleh lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan. Peran kepemimpinan sangat krusial dalam membentuk serta mempertahankan lingkungan kolaboratif, melalui penggabungan keahlian dan pengetahuan dari para pelaku.

4. *Kepercayaan (trust)*

Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kepercayaan sebagai salah satu faktor kunci. Kepercayaan berasal dari keyakinan bahwa setiap pihak akan berlaku jujur dalam menjalankan perjanjiannya, memenuhi kewajibannya, dan tidak mengeksploitasi pihak lain. Penggunaan kontrol formal yang berlebihan dapat mengurangi tingkat kepercayaan antar pelaku, karena kontrol dianggap sebagai manifestasi ketidakpercayaan terhadap kapabilitas dan integritas masing-masing pelaku.

5. *Karakteristik pribadi tertentu (specific personal characteristics)*

Dalam kolaborasi, penting bagi para pelaku untuk bersikap terbuka dan memiliki kemampuan untuk memahami motif serta kepentingan partisipan lainnya. Kompromi dalam proses pengambilan keputusan bersama dapat lebih mudah dicapai jika segala kepentingan partisipan yang terlibat dibahas secara terinci.

2.4 Komponen Kolaborasi dalam Penelitian

Dalam menganalisis elemen-elemen kolaborasi sebagai alat analisis dalam penelitian ini, peneliti memperinci kombinasi elemen kolaborasi yang telah dijelaskan oleh para ahli sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dialog tatap muka (*face to face dialogue*).
2. Membangun kepercayaan (*trust*)

building). 3. Komitmen terhadap proses kolaborasi (*commitment to the process*). 4. Pemahaman bersama (*shared understanding*). 5. Proses komunikasi. 6. Koordinasi.

a. Pemahaman bersama/tujuan bersama

Pemahaman bersama melibatkan upaya untuk menyelaraskan pemikiran dan mencapai tujuan bersama di antara para pelaku. Keberadaan pemahaman bersama atau tujuan bersama menjadi unsur kunci dalam kerja sama, memfasilitasi kerjasama para pelaku untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman bersama atau tujuan bersama berkaitan dengan tujuan bersama masing-masing pemangku kepentingan, serta cara mencapai kesepakatan bersama dalam kolaborasi antar pemangku kepentingan.

b. Administrasi

Administrasi merujuk pada manajemen yang bersifat kooperatif, yang melibatkan pengorganisasian semua aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan melalui sistem yang efektif. Komponen administratif dalam konteks penelitian ini terkait dengan klarifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing peserta dalam kerjasama antara pemangku kepentingan.

c. Kepercayaan

Kepercayaan adalah unsur krusial dalam kerjasama. Kepercayaan dapat dijabarkan sebagai keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Kepercayaan memiliki pengaruh yang besar pada saling ketergantungan antar kolaborator, karena partisipan akan lebih bersedia untuk berkolaborasi dengan mereka yang dipercayai tanpa merasa terpaksa atau terbebani kewajiban.. Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan mengacu pada keyakinan seorang aktor terhadap kemampuannya dan kemampuan aktor lain dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

d. Komitmen

Komitmen memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan kerjasama. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan komitmen secara sederhana sebagai persetujuan atau keterikatan terhadap sesuatu. Dalam konteks kolaboratif, faktor kepercayaan, saling ketergantungan dan saling

pengertian dapat mempengaruhi keterlibatan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, saling ketergantungan dan saling pengertian, semakin besar keinginan peserta untuk bekerjasama. Dalam penelitian ini, engagement mengacu pada konsistensi partisipan dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

a. **Mutualitas**

Mutualitas adalah interaksi saling menguntungkan antara individu-individu yang saling terkait. Mutualitas dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan antara aktor-aktor tersebut dan pada gilirannya mempengaruhi tingkat komitmen mereka dalam kolaborasi. Dalam penelitian ini, mutualitas terkait dengan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar aktor.

b. **Komunikasi**

Komunikasi memiliki peran kunci dalam kerjasama sebagai komponen utama. Fungsi komunikasi adalah untuk menjaga hubungan kerjasama di antara para pelaku. Dalam penelitian ini, komunikasi mengacu pada tingkat intensitas interaksi komunikatif yang terjadi antara para pelaku, baik secara langsung maupun melalui perantara. Komunikasi juga mencakup pertukaran informasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi..

c. **Lingkungan kolaborasi**

Lingkungan kolaboratif adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dimaksud adalah ada tidaknya konflik antar pemangku kepentingan, serta upaya yang dilakukan masing-masing pemangku kepentingan untuk menyelesaikan setiap konflik yang timbul secara bersama-sama.

2.5 Peran Pariwisata dalam Pembangunan

Pariwisata memiliki peranan yang penting dalam memajukan ekonomi negara, terbukti dari peningkatan yang terus-menerus dalam tingkat kesejahteraan ekonomi. Pertumbuhan kesejahteraan ini memiliki dampak langsung pada kebutuhan dan gaya hidup manusia, sehingga Pariwisata telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari atau kebutuhan pokok. Di Indonesia, sektor pariwisata memegang peranan kunci dalam meningkatkan penerimaan devisa dan

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Yoeti, 2008, (27–44) peran pariwisata dalam pembangunan adalah dalam rangka pemerataan *income* bagi pelaku yang bergerak dalam bidang industri pariwisata yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Sektor pariwisata dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan sektor lainya dengan kata lain pariwisata dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata/berimbang.

2.6 Tinjauan tentang Agrowisata

Agrowisata adalah suatu bentuk pariwisata pedesaan yang menawarkan pengalaman wisata melalui kegiatan pertanian, melibatkan penduduk lokal dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan agrowisata. Agrowisata adalah kegiatan bisnis yang dijalankan oleh para petani di sektor pertanian, dengan tujuan memberikan hiburan dan pendidikan kepada pengunjung. Melalui agrowisata, tercipta peluang pendapatan tambahan dan peningkatan keuntungan bagi masyarakat setempat. Pengunjung agrowisata memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan petani dan secara tidak langsung mendukung peningkatan produk pertanian²⁶.

Menurut Lobo et all. (1999), Agrowisata memiliki potensi untuk memberikan peluang kepada petani lokal dalam meningkatkan pendapatan, sekaligus secara berkelanjutan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Dalam kerangka ini, pengembangan agrowisata yang menekankan budaya lokal dan optimalisasi pemanfaatan lahan dapat secara bersamaan meningkatkan pendapatan petani dan mendukung pelestarian sumber daya lahan. Selain itu, Partisipasi ini juga ikut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan budaya serta pengetahuan teknologi lokal (*indigenous knowledge*) yang umumnya selaras dengan kondisi alam di sekitarnya²⁷. Agrowisata, sebagai optimalisasi potensi pertanian sebagai destinasi wisata, memiliki tujuan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pertanian, melibatkan aspek kehutanan, dan sumber daya pertanian²⁸.

²⁶ Jolly, D. A., & Reynolds, K. A. (2005). Consumer demand for agricultural and on-farm nature tourism. *Small Farm Center, University of California-Davis*.

²⁷ Utama, I. G. B. R., & Junaedi, I. W. R. (2015). *Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia:: Solusi Masif Pengentasan Kemiskinan*. Deepublish.

²⁸ Budi Purwo Nugroho, "Strategi Bersaing Agrowisata Bhumi Merapi Yogyakarta," 2017.

2.7 Konsep Helix

Konsep helix muncul dari keyakinan bahwa inovasi adalah hasil dari interaksi yang melibatkan berbagai pihak (Praswati, 2017). Konsep inovasi *Triple Helix* (TH), yang melibatkan tiga aktor dalam hubungan yang erat, diperkenalkan oleh Etzkowitz & Leydesdorff (1995) dan telah diterima dengan luas di negara-negara berkembang (Shinn, 1997; Leydersdorff & Van den Basselaar, 1997). Selanjutnya, Konsep *Quadruple Helix* menggabungkan *civil society*²⁹. Proses inovasi dalam kerangka *Quadruple Helix* difokuskan pada unsur teknologi, ilmu pengetahuan, barang dan jasa, serta dampak ekonomi secara menyeluruh³⁰. Seperti juga yang dijelaskan dalam penelitian (Carayannis & Campbell, 2009), *Quadruple Helix* melibatkan tambahan elemen, seperti pemerintah, fasilitas penelitian, laboratorium, dan masyarakat sipil. Peran masyarakat sipil terpusat pada konsumsi aspek teknologi, pengetahuan, barang, dan jasa, serta dampak ekonomi secara keseluruhan. Peran masyarakat sipil terpusat pada konsumsi aspek teknologi, pengetahuan, barang, dan jasa, serta dampak ekonomi secara keseluruhan³¹. Selanjutnya, muncul konsep Pentahelix yang diinisiasi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya. Melalui kolaborasi aktor ABCGM (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media), konsep *Pentahelix* diimplementasikan dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia.

2.8 Konsep Heptahelix

Konsep *Heptahelix* mengusulkan kolaborasi yang melibatkan lebih banyak pihak daripada konsep Pentahelix, dengan melibatkan organisasi non-pemerintah (NGO)/lembaga swadaya masyarakat/aktivis pariwisata, dan juga partisipasi kaum milenial. Dalam konsep Heptahelix, aktor-aktor ditempatkan sebagai berikut: Pemerintah sebagai regulator, Akademisi sebagai konseptor, Bisnis sebagai investor, Masyarakat Lokal sebagai operator, Media sebagai alat promosi,

²⁹ Hary Sulaksono, "Roadblock Implementasi Peran Quadruple Helix Dalam Upaya Meningkatkan Kapabilitas Inovasi Dan Keunggulan Bersaing," in *UNEJ E-Proceeding*, 2018, 366–381.

³⁰ Oscar Afonso, Sara Monteiro, and Maria Thompson, "A Growth Model for the Quadruple Helix," *Journal of Business Economics and Management* 13, no. 5 (2012).

³¹ Sulaksono, "Roadblock Implementasi Peran Quadruple Helix Dalam Upaya Meningkatkan Kapabilitas Inovasi Dan Keunggulan Bersaing."

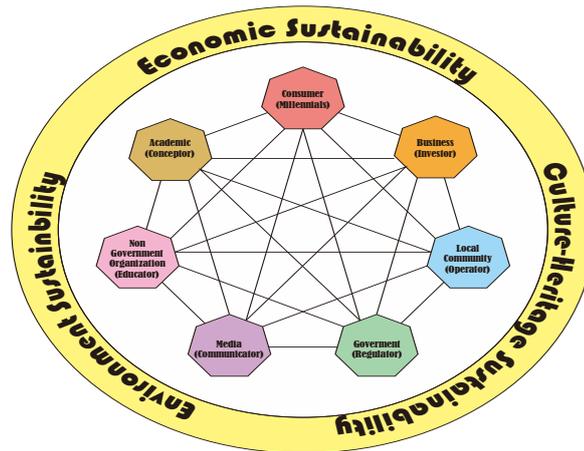
Organisasi Non-Pemerintah sebagai fasilitator, dan melibatkan kaum Milenial atau generasi muda sebagai konsumen dan pihak yang berkontribusi pada promosi.

Di Indonesia, penelitian tentang konsep helix sudah banyak dilakukan antara lain penggunaan konsep *Triple Helix*, *Quantuple Helix*, *Quadruple Helix* dan *Pentahelix* oleh akademisi maupun instansi pemerintah tetapi penelitian *Heptahelix* sesuai kajian disertasi ini belum pernah dilakukan. Pembahasan tentang *Heptahelix* menjadi suatu kajian yang menarik dengan dua aspek penting. Pertama, ini merupakan kajian yang inovatif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman kolaborasi antar aktor dalam pengembangan desa wisata, khususnya dalam konteks inovasi desa. Kedua, tantangan utama dalam menerapkan konsep *Heptahelix* dalam pembangunan kawasan perdesaan di Indonesia adalah kurangnya wadah atau forum yang mengkoordinasikan kolaborasi antar aktor serta belum adanya payung hukum yang mendukung keberlanjutan dari kolaborasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan menghasilkan output berupa:

1. Forum Bersama Pengembangan Desa Wisata
2. *Legal draft* Kolaborasi Aktor *Heptahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata berbasis *Smart Village*.

Heptahelix of millenials of agrotourism (kolaborasi yang sinergis antar *stakeholder* yang terdiri dari Pemerintah Daerah beserta DPRD, Pengusaha, Perguruan Tinggi, Masyarakat lokal, Media dan NGO/LSM/pegiat wisata serta millenial). Ide tentang pengembangan desa wisata dan penguatan peran kelompok sadar wisata berbasis *Heptahelix of millenials of agrotourism* merupakan gagasan yang benar-benar baru yang penulis tawarkan dalam rangka pengembangan desa wisata di lokasi penelitian dan penguatan peran kelompok sadar wisata.

Berikut diagram kolaborasi aktor *Heptahelix* berdasarkan analisis penulis berkaitan dengan penelitian ini.



Gambar 2. Diagram Kolaborasi Heptahelix

Sumber: Analisis Peneliti, 2023

2.9 Konsep *Smart Village*

Konsep *Smart Village* atau desa cerdas membawa makna yang mendalam. Istilah ini mengacu pada desa yang memiliki tingkat kecerdasan atau inovasi yang tinggi. Penggunaan kata "*smart*" bertujuan untuk mengatasi *stereotip* yang mungkin melekat pada desa, seperti pandangan bahwa SDM di desa kurang memiliki pendidikan yang memadai, tertinggal dalam perkembangan, atau menghadapi masalah kemiskinan. Saat ini, desa diakui memiliki kapasitas untuk melakukan pembangunan yang cerdas dan inovatif guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Konsep *Smart Village* adalah inisiatif berbasis komunitas yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan pedesaan.

Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat, melibatkan berbagai kelompok, etnis, dan profesi yang ada di desa secara bersama-sama. Tujuannya adalah mendorong perencanaan pelayanan publik yang efisien dan terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan harapan dapat memaksimalkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keberadaan *smart village* memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat kemajuan desa dengan meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, dan harmoni masyarakat lokal. *Smart village* tidak hanya memiliki relevansi hukum untuk membangun desa yang mandiri, tetapi juga merespons perkembangan digitalisasi yang signifikan saat ini, yang berdampak besar pada evolusi desa,

khususnya dalam mengubah perilaku masyarakat. Salah satu cara untuk mengantisipasi dampak tersebut adalah melalui pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui penerapan desa pintar.

Variabel dalam konsep *smart city* muncul seiring dengan evolusi bentuk dan pengembangan wilayah, yang erat terkait dengan pengembangan dan manajemen kota. Edukasi mengenai konsep *smart city* masih kurang sebanding dengan tingkat pemahaman terhadap konsep tersebut. Pengembangan *smart village* memiliki dimensi yang lebih sesuai dengan konteks pedesaan, mencakup *smart government*, *smart community*, *smart economy*, dan *smart environment*. Di sisi lain, penerapan *smart mobility*, *smart transportasi*, dan *smart people* dianggap kurang sesuai untuk mencapai konsep *smart village*³².

Setiap variabel tersebut memiliki beberapa indikator dan parameter untuk mengukur pencapaiannya. Dian Herdiana (2019) menyebutkan bahwa ada tiga variabel pencapaian yang menjadi dasar dari penerapan konsep *smart village*, yang saling berinteraksi secara sinergis. Berikut adalah tiga dimensi indikator dalam konsep *smart village* yaitu *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*³³.

2.9.1 Smart Government

Teknologi informasi dan komunikasi dalam konsep *smart village* dapat dimanfaatkan dalam pemerintahan desa untuk memudahkan proses persiapan dan melaksanakan pembangunan desa serta meningkatkan layanan masyarakat sehingga fungsi pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dan secara transparan. Pemerintahan yang cerdas dapat dikenali melalui keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, ketersediaan layanan publik dan sosial, dan tingkat transparansi yang tinggi. Penerapan *smart government* bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pelayanan pemerintah dengan cara yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, melalui penggunaan manajemen *e-government* atau manajemen pemerintahan elektronik serta optimalisasi teknologi dalam sistem pemerintahan.

³² K. W. Prasetyo, P. S., Gunawan, T., Rachmawati, T., Herwanto, T. S., & Wicaksono, *Inovasi Untuk Mewujudkan Desa Unggul Dan Berkelanjutan.*, Kedua. (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2017).

³³ Herdiana, "Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages."

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* menyatakan bahwa tujuan pengembangan *e-government* adalah untuk memajukan manajemen berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien melalui penataan manajemen dan proses kerja di pemerintahan, dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep pengembangan *e-government* ditujukan untuk aktivitas pengolahan dan manajemen data dan informasi, implementasi sistem manajemen ketenagakerjaan secara elektronik, dan penyediaan akses mudah dan terjangkau bagi masyarakat umum terhadap layanan publik.

2.9.2 Smart Community

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bukan hanya menjadi sasaran program pemerintah dan pembangunan desa, melainkan juga menjadi peran sentral dalam merumuskan kebijakan serta menjalankan pembangunan desa. Oleh karena itu, keterlibatan yang aktif dari masyarakat desa dalam proses pembangunan menjadi sangat penting agar mereka dapat mengalami dampak positif dari program-program pemerintah yang telah dilaksanakan. Selain itu, diharapkan bahwa masyarakat dapat mengambil manfaat dari kemajuan dan adopsi teknologi informasi sebagai suatu peluang untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam proses pembangunan desa (Herdiana, 2019).

Menurut Pedoman Implementasi (1997), Konsep komunitas cerdas menggambarkan suatu lingkungan di mana anggota pemerintahan daerah, sektor bisnis, dunia pendidikan, lembaga, dan masyarakat umum memiliki pemahaman tentang potensi informasi dan bersatu untuk menciptakan perubahan yang positif dan bermakna dalam komunitas mereka. Definisi komunitas cerdas yang dikemukakan oleh Industry Canada (1998) menyatakan bahwa komunitas cerdas adalah komunitas di mana anggota, organisasi, dan institusi memiliki kepentingan bersama dan bekerja sama dalam kemitraan untuk mendapatkan keuntungan dari informasi, komunikasi, dan teknologi informasi serta membuat perbedaan yang signifikan, baik di lingkungan maupun di masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa

desa diharuskan memanfaatkan serta memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Komponen kelembagaan desa mencakup pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki peran sebagai alat partisipasi masyarakat desa dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan desa, dengan tujuan meningkatkan pelayanan desa secara optimal.

Lembaga Swadaya Masyarakat, di sisi lain, berfungsi sebagai pengawas adat dan merupakan bagian organik dari struktur desa yang tumbuh dan berkembang berdasarkan inisiatif masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagai perwakilan dari masyarakat desa. Tugas Badan Permusyawaratan Desa mencakup pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, penerimaan aspirasi dari masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

2.9.3 Smart Environment

Pedesaan memiliki sifat dan ciri khas yang secara erat terhubung dengan lingkungan desa. Konsep *smart village* tidak hanya menitikberatkan pada aspek lingkungan alam, melainkan juga mencakup semua komponen yang membentuk ciri khas desa, termasuk tatanan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Aspek sosial di desa mencakup unsur adat dan budaya, sementara aspek lingkungan melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan berkelanjutan. Era teknologi saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya manajemen dan konservasi lingkungan dapat memperkuat serta mendukung nilai-nilai adat dan budaya. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti pendataan, dokumentasi, dan identifikasi potensi alam, tanpa menimbulkan dampak merugikan pada ekosistem.

Dalam konteks *smart village*, lingkungan yang cerdas memiliki atribut

yang terkait dengan efisiensi dan keberlanjutan. Fokus dari program *smart village* adalah untuk mengoptimalkan seluruh potensi desa, termasuk potensi pariwisata dan aspek lainnya. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan konsep *smart village* menurut Dian Herdiana (2019): Berikut tabel penjelasan tentang *smart village* menurut Herdiana, Dian (2019);

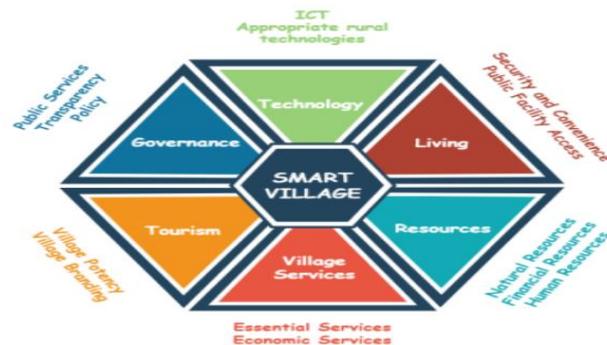
Table 2. Aspek-aspek *smart village*

No	Aspek	Smart Village
1.	Pendekatan	<i>Bottom-Up</i>
2.	Posisi Pemerintah	Fasilitator
3.	Posisi Masyarakat	<i>Customer</i>
4.	Proses Pengembangan	Meningkatkan, meningkatkan kesadaran, dan berpartisipasi dalam unsur-unsur <i>smart village</i> .
5.	Prioritas Sasaran	Kelompok masyarakat di tingkat ekonomi menengah, kelompok yang berada dalam kondisi kurang mampu, dan mereka yang belum mengalami pemberdayaan.
6.	Prasyarat Keberhasilan	Pendekatan sosial-kultural menjadi fondasi utama. Pengenalan yang akurat terhadap berbagai nilai, karakteristik, norma, dan masalah yang ada dalam masyarakat menjadi landasan untuk keberhasilan <i>smart village</i> .
7.	Tujuan	Realisasi pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang berdasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi.

Sumber : Dian Herdiana, 2019

Pembangunan *smart village* harus dilihat sebagai kondisi dimana masyarakat terdorong untuk menggali potensi dan meningkatkan kapasitasnya. Inisiatif ini didorong oleh pemerintah desa dengan tujuan melaksanakan pembinaan dan memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Penerapan teknologi informasi menjadi sarana untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan pembangunan *smart village* didasarkan pada partisipasi masyarakat yang dimulai dari bawah, dimana aspirasi dan inisiatif masyarakat menjadi landasan. Pemerintah desa melakukan penguatan kelembagaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pelatihan dan pemberdayaan, dengan teknologi informasi sebagai salah satu sarana. Peran pemerintah dalam hal ini adalah memfasilitasi

keseluruhan proses tersebut. Dengan demikian, target yang ditetapkan adalah kelompok kelas menengah, kelompok miskin, dan kelompok yang belum mengalami pemberdayaan. Pengembangan teknologi informasi diharapkan dapat mendorong kelompok masyarakat ini untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan (Herdiana, Dian, 2019).



Gambar 3. Gambar *Smart Village*
 Sumber: Susanto dan Aziiza (2020)

Smart village adalah pengembangan masyarakat untuk mengambil tindakan yang cerdas dan bijaksana dalam mengatasi berbagai masalah, dengan menekankan efisiensi penggunaan sumber daya di wilayah tempat tinggal. Pendekatan ini memperhatikan nilai-nilai adat dan standar lokal dalam menerapkan solusi untuk meningkatkan kondisi masyarakat. Seperti gambar diatas bahwa *smart village* terdiri dari enam dimensi: 1) Pemerintahan atau Tata Kelola, 2) Teknologi, 3) Sumber Daya, 4) Layanan Desa, 5) Kualitas Hidup, dan 6) Pariwisata³⁴.

2.9.4 *Smart People*

Berdasarkan Subekti & Damayanti (2019), konsep *Smart People* mengacu pada masyarakat yang cerdas. Dalam konteks pengembangan pariwisata, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama yang dapat mendukung perkembangan desa wisata. Dalam upaya pengembangan desa, keterlibatan masyarakat menjadi komponen yang penting. Hal ini mencakup kemampuan masyarakat dalam menggali potensi lokal, memanfaatkan keterampilan sumber

³⁴ Aziiza and Susanto, "The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency)."

daya manusia di desa, dan menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi untuk mendukung kemajuan desa tersebut.

2.9.5 Smart Promotion

Subekti & Damayanti (2019), konsep *smart promotion* dalam pengembangan potensi desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan upaya pemasaran. Strategi *smart promotion* dapat diwujudkan melalui *branding* kawasan wisata yang dipromosikan, yang kemudian dipasarkan melalui berbagai *platform* media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, *TikTok*, serta melalui *website* dan *blog*³⁵.

2.10 Literature Review

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2020), dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar aktor Pentahelix dalam pengembangan agrowisata di Kampong Kopi Pekon Rigis Jaya melibatkan aktor tertentu dan cenderung beroperasi secara terpisah. Oleh karena itu, disarankan untuk merancang regulasi yang mengatur kerjasama antar pelaku Pentahelix dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata. Sektor pariwisata memiliki peran signifikan sebagai kontributor pendapatan bagi APBN dan dapat memberikan peningkatan pendapatan pada tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan promosi destinasi wisata yang menarik bagi masyarakat, baik itu dari tingkat domestik maupun mancanegara, dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan ke Kampong Kopi. Tidak hanya itu, tetapi juga penting untuk memberikan perhatian pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada, serta memanfaatkan potensi dan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan produk unggulan³⁶. Selanjutnya hasil penelitian Kagungan & Tim (2021) menyimpulkan dan memberikan rekomendasi sebagai berikut: kebijakan penatakelolaan dan pengembangan pariwisata cenderung berjalan sendiri-sendiri dan belum memiliki tema sentral yang layak jual, termasuk lebih memaksimalkan promosi yang dilakukan. Oleh karena itu perlunya jalinan kerjasama yang sinergis

³⁵. Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 18.

³⁶ Fitria, "Sinergitas Aktor Pentahelix Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata Berbasis Agrowisata Kampong Kopi."

antar aktor, di bentuknya forum kerjasama yang mewadahi kolaborasi tersebut, dan adanya “payung hukum” yang menaunginya serta pentingnya pelibatan *Non Government Organisation* (NGO) dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Adanya pemikiran tentang inovasi yang melibatkan para aktor dengan kontribusi sesuai kapasitasnya melahirkan ide tentang konsep helix, Praswati, (2017: 690). Kotler *et all* (2004) menyatakan bahwa proses pengembangan pariwisata didukung oleh adanya aktor-aktor yang saling berkontribusi berbagi pemikiran dan keahlian untuk mencapai tujuan bersama.

Smart village Keberlanjutan pembangunan desa mandiri tidak hanya dipandang penting karena ketersediaan teknologi, tetapi juga karena pengaruh yang signifikan dari perkembangan digitalisasi pada pembangunan desa, terutama dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Sebagai langkah antisipatif terhadap dampak tersebut, menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui konsep desa pintar menjadi salah satu solusi. Program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai fondasi utama dalam pembangunan desa³⁷. *Smart Village* adalah sebuah konsep inisiatif yang berasal dari masyarakat desa untuk memperbaiki layanan publik melalui penggunaan inovasi digital dalam berbagai sektor seperti kesehatan, layanan sosial, pendidikan, energi, transportasi, dan pariwisata. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di wilayah tersebut. *Smart Village* memiliki beberapa karakteristik khusus, termasuk memperkuat interaksi sosial antarwarga, memanfaatkan teknologi digital, mempertimbangkan perkembangan di luar desa, serta membangun kemitraan dengan perusahaan dan aliansi. Kemajuan teknologi yang pesat telah memudahkan akses terhadap produk, sehingga tidak hanya memerlukan kunjungan langsung ke desa wisata, tetapi juga dapat dinikmati secara *online*³⁸. Selanjutnya, beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait pengembangan pariwisata Kampoeng Kopi Pekon Rigis Jaya:

³⁷ Herdiana, Dian, “Implementasi Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village Implementation Of Smart Governance Based On Smart” 21, no. 2 (2020): 145–160.

³⁸ Aries, B., & Budiandrian, B. (2019). Ikhtiar Diskusi “Smart City and Smart Village” Ikhtiar Lompitan Pembangunan Nasional. Jakarta Timur: Publikasi Center For Indonesia Analysis (CIPA)

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Fitri Damayanti berjudul Peran Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Desa Wisata Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

Hasil penelitian menunjukkan peran kelompok sadar wisata dalam pengelolaan Desa Wisata Rigis Jaya dapat dilihat sebagai fasilitator yang memenuhi fungsi animasi sosial. Selain itu, kelompok ini juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, menyelenggarakan pelatihan, dan menyediakan informasi. Dalam perannya yang representatif, kelompok sadar wisata desa Rigis Jaya menjaga dan mengelola sumber daya lokal. Kelompok sadar pariwisata Rigis Jaya kemudian dilatih keahlian dan keterampilannya untuk menjalankan peran tersebut dalam peran teknis

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Nurcholis Madjid tahun 2023 berjudul Pengaruh Promosi Media Sosial Instagram Dan daya Tarik Wisata Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan (Studi Kasus Pada Wisata Kampoeng Kopi Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat

Dari temuan penelitian, disimpulkan bahwa secara terpisah, faktor promosi di *platform* jejaring sosial Instagram dan daya tarik wisata berpengaruh pada keputusan untuk berkunjung ke Kampung Kopi Rigis Jaya di Lampung Barat. Selain itu, ketika kedua faktor tersebut digabungkan secara bersama-sama, promosi di *Instagram* dan daya tarik wisata memiliki dampak terhadap keputusan berkunjung, dengan tingkat pengaruh mencapai 19,5%.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aldhi Yoga Trisna, pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Pendapatan Dan Strategi Pengembangan Agrowisata Kampung Kopi Di Pekon Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan temun penelitian, dapat disimpulkan bahwa total pendapatan yang dihasilkan dari Agrowisata Kampung Kopi di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2020 dan 2021 rata-rata mencapai Rp125.600.000 Oleh karena itu, rata-rata pendapatan bulanan dari agrowisata Kampung Kopi selama periode tersebut adalah sekitar Rp5.233.000

Selain itu, penilaian masyarakat terhadap Agrowisata Kampung Kopi memiliki nilai rata-rata sebesar 4 dari delapan indikator. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat secara positif mendukung

keberlanjutan Agrowisata Kampung Kopi. Strategi pengembangan Agrowisata Kampung Kopi terbagi menjadi dua strategi, yaitu strategi jangka panjang (lebih dari 5 tahun) yang mencakup (a) Menjadikan Agrowisata Kampung Kopi sebagai pusat pembelajaran bagi pengunjung mengenai kopi di Lampung Barat, (b) Berpartisipasi dalam pameran sebagai langkah untuk memajukan Agrowisata, dan (c) Meningkatkan infrastruktur serta memperbaiki akses jalan guna meningkatkan kenyamanan pengunjung. Untuk strategi jangka pendek (kurang dari 5 tahun), beberapa langkahnya mencakup (a) Pemanfaatan teknologi melalui media sosial sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat pengunjung, (b) Koordinasi efektif antara pihak sponsor, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat guna menyelaraskan kebijakan pembangunan. Selain itu, (c) Melibatkan peran aktif masyarakat dalam pertemuan atau kegiatan rutin untuk membina keterlibatan mereka dalam pengelolaan Agrowisata Kampung Kopi dan menjaga keberlanjutan agrowisata.

4. Penelitian yang dilakukan Agustina Veny pada tahun 2023 yang berjudul Pengembangan Agrowisata Kampong Kopi Berbasis Masyarakat Di Pekon Rigus Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam program agrowisata kampong kopi berawal dari pihak aparat desa yang ingin mencari potensi lokal untuk dijadikan program agrowisata dan akhirnya mengajak masyarakat untuk bermusyawarah dalam rapat agenda yang diawali dengan agenda pengkapisitan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi program. Kegiatan tersebut berhasil dilakukan, terbukti berdampak positif bagi perkembangan dan kemajuan Pekon Rigus Jaya dalam penanganan program PDT (Program Desa Tertinggal), program Agrowisata kampong Kopi mampu menarik wisatawan berkunjung ke Pekon Rigus Jaya Kabupaten Lampung Barat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Noviarita dan Tim pada tahun 2020 berjudul Pengelolaan Desa Wisata Dengan konsep *Green Economy* Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19. (Studi di desa wisata Di Kabupaten Lampung Barat dan Jawa Barat)

Seluruh desa wisata telah mengelola dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau. Meskipun belum semua desa wisata yang menjadi fokus penelitian

sepenuhnya menerapkan konsep tersebut, namun pelestarian lingkungan hidup tetap menjadi fokus utama dalam pengelolaan desa. Pihak pengelola secara berkelanjutan memprioritaskan pemeliharaan lingkungan alam, dengan mengambil berbagai langkah, termasuk upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, terutama sampah plastik. Pihak pengelola berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa desa wisata tersebut tidak merugikan keberlanjutan alam yang ada. Pariwisata desa harus mematuhi prinsip-prinsipnya, melibatkan masyarakat lokal, dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Munculnya pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang cukup besar pada pelaku usaha pariwisata, termasuk para pengelola desa wisata. Penurunan jumlah pengunjung secara signifikan berimplikasi pada pendapatan yang diterima oleh para pengelola wisata. Dampak yang paling terlihat adalah penurunan pendapatan pengelola desa wisata sekitar 50% hingga 70% akibat pandemi Covid-19.

Sebagian besar pengelola desa wisata berasal dari kelompok usia produktif. Meskipun situasi ini membawa dampak negatif pada pendapatan mereka, namun juga memberikan peluang bagi pengembangan desa wisata melalui peningkatan produktivitas dan kreativitas. Dari beberapa temuan penelitian sebelumnya, peneliti dapat menarik benang merah yang menjadi sebuah kesimpulan penting: bahwa kajian penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan masalah kolaborasi antar aktor, menekankan pada konsep administrasi yaitu *collaborative governance*, yaitu kolaborasi antar aktor untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya, peneliti juga menggunakan beberapa penelitian tentang Helix sebagai literature peneliti, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, H., & Rukmana, A. R. (2021) yang berjudul *The Quadruple Helix Strategy for Tourism The Quadruple Helix Strategy for Tourism Development: Case Study at Mekar Rahayu Village, Marga Asih District, Bandung Regency: Case Study at Mekar Rahayu Village, Marga Asih District, Bandung Regency* Strategi Quadruple Helix (akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) memainkan peran penting dalam pengembangan pariwisata di Desa Mekar Rahayu. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dari

perguruan tinggi di Desa Mekar Rahayu belum diikuti dengan implementasi baik oleh pemerintah desa maupun pemangku kepentingan terkait pengembangan pariwisata di wilayah tersebut. Para pelaku usaha dan pemilik modal di Desa Mekar Rahayu dan sekitarnya masih belum maksimal dalam memanfaatkan potensi wisata yang ada di Kecamatan Marga Asih, padahal setidaknya 49 tempat wisata di kawasan tersebut masih bisa dimaksimalkan dengan menginvestasikan lebih banyak modal dan melakukan promosi secara efektif dan berkreasi. inovasi dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya yang ada di wilayah tersebut.

Peran masyarakat sekitar sebagai kelompok yang memiliki pengetahuan dan mengetahui potensi sumber daya alam yang ada masih belum maksimal. Padahal seharusnya para pemangku kepentingan dengan pengetahuan dan pengalamannya bisa memanfaatkan potensi yang ada menjadi ladangnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya, namun mereka masih terbelenggu dengan alasan modal usaha yang tidak mampu. Selama ini kesadaran untuk mengembangkan dan memanfaatkan destinasi wisata di Mekar Rahayu hanya dimiliki oleh masyarakat yang berada di lokasi objek wisata seperti masyarakat di Kampung Mahmud.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Sloup, R., Riedl, M., & Machoň, M. (2023) yang berjudul *Comprehensive Evaluation of the Design of a New National Park Using the Quintuple Helix Model*

Kawasan lindung berfungsi sebagai batu loncatan untuk pelestarian keanekaragaman hayati, dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Taman nasional bertujuan untuk membatasi intervensi manusia untuk melindungi komunitas dan proses alam. Studi ini menganalisis dampak transformasi Kawasan Lanskap Lindung Křivoklátsko menjadi Taman Nasional yang diusulkan di Republik Ceko, yang merupakan program yang dipromosikan oleh partai politik. Dengan menggunakan model quintuple helix, studi ini menilai perubahan dari perspektif pembangunan berkelanjutan.

Analisis ini mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk dampak terhadap penduduk setempat, ekonomi, kehutanan, kegiatan bisnis, dan pengembangan regional. Manajemen yang ada di wilayah Křivoklátsko merupakan contoh manajemen hutan berkelanjutan multifungsi. Berdasarkan evaluasi, studi ini menemukan argumen yang tidak memadai untuk mendeklarasikan Taman Nasional Křivoklátsko. Studi ini menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara tuntutan sosial terhadap perlindungan alam dengan kesadaran terhadap langkah-langkah yang sudah ada dan kondisi khusus wilayah. Perlindungan alam seharusnya terintegrasi ke dalam semua kegiatan manusia dalam lanskap yang telah terbentuk secara budaya dan historis, daripada hanya mengejar tujuan politik semata. Manajemen kehutanan partisipatif memainkan peran penting dalam transformasi lanskap. Studi ini menyoroti pentingnya pembangunan lanskap berkelanjutan dan interaksi antara universitas, pemerintah, industri, dan sektor sipil dengan lingkungan.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Kagungan, dian and Duadji, Noverman and Meutia, Intan Fitri (2021) yang berjudul *Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran Regency*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan model kolaborasi Penta Helix dalam pengembangan pariwisata di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratay, Kabupaten Pesawaran. Kolaborasi model Penta Helix dalam pengembangan pariwisata dilihat dari parameter berbagai pihak yang terlibat. Kolaborasi model Penta Helix dalam pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya memerlukan perhatian khusus. Kurangnya komunikasi antar pihak, rendahnya kapasitas pendanaan dan manajemen, serta kurangnya kreativitas sumber daya manusia terampil dalam memproduksi produk industri pariwisata lokal, terutama dalam industri kerajinan dan souvenir, juga mempengaruhi tingkat kolaborasi Penta Helix yang kurang optimal. Namun, keberadaan desa wisata juga membawa dampak positif, membuka lapangan kerja baru dan melestarikan lingkungan dengan daerah yang indah. Oleh karena itu, kolaborasi model Penta Helix, dengan keterlibatan Akademisi, Swasta, Masyarakat, Pemerintah, dan Media, sangat penting untuk mendukung pariwisata di masa depan. Namun, sejauh ini, kolaborasi ini masih belum

optimal, diukur dari ketergantungan antar pihak, penyatuan ide sebagai suatu keseluruhan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Andrea Basworo Palestho, Dheanita Sekarini Octanis Tahun 2023 yang berjudul *Reconstructing Penta-Helix: A Study of A Literature Review*

Penelitian ini mempromosikan Deep Penta-helix. Deep Penta-helix merupakan pendekatan dan bentuk baru Penta helix yang memanfaatkan perspektif lokal, kesadaran, kearifan lokal, dan gaya hidup untuk pariwisata. pengembangan dan pengelolaan. Penta-helix yang dalam dapat lebih membantu penerapan pariwisata secara komprehensif karena seluruh pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha, pemerintah, media) harus memiliki rasa kebersamaan masyarakat lokal, atau setidaknya memiliki kesadaran dan pemahaman perspektif yang sama dalam mewujudkan nilai-nilai luhur budaya yang ada pada destinasi tertentu. Penta-helix yang dalam tidak menafikan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan, justru masyarakat lokallah yang menjadi pihak utama acuan dalam pembangunan dan pengelolaan pariwisata, dan tidak hanya di pusat.

5. Hardianto, W.T., *et al.* 2019. Pentahelix Sinergy on Tourism Development in Batu, East Java. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*. 10(6), 137-149.

Pariwisata di Batu memerlukan pengembangan lebih lanjut. Hal itu bisa dilakukan dengan mensinergikan kelima elemen yang ada di PentaHelix. Mereka terdiri dari pemerintah, dan universitas atau akademisi yang berperan dalam kajian akademis dan kritis, untuk menentukan bisnis mana yang tidak menguntungkan. Berikutnya, pihak swasta sebagai pemilik modal mengembangkan pariwisata, disusul oleh media, melalui publikasi yang baik dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan Kota Batu, dan bersinergi satu sama lain. Terakhir, lembaga dinass lingkungan hidup berperan sebagai penyedia sumber daya dan juga dapat menjadi analis kreatif yang memberikan kajian dan masukan yang bersifat non-destruktif, agar keseimbangan alam dapat dikembangkan di kawasan wisata. Perwujudan pengembangan pariwisata yang diinginkan adalah terciptanya model pengembangan pariwisata yang

disinergikan dengan konsep kerjasama 'inter-helix', sehingga tercipta rekomendasi model pengembangan pariwisata berperspektif PentaHelix di Batu. Secara khusus, mereka dapat mendiskusikan bagaimana konsep akademisi dan heliks lingkungan bekerja sama untuk mendukung pengembangan pariwisata. Solusi terbaiknya adalah membangun simbiosis antara pariwisata dengan pengembangan pariwisata itu sendiri, melalui sinergi berbagai elemen dalam pentahelix. Artinya, dalam mengembangkan sector pariwisata, kebersamaan juga dibangun melalui sinergi atau kerja sama. Jika hal itu bisa terwujud, betapapun majunya negara kita, kerja sama yang baik antar berbagai sektor dalam pentahelix akan tetap terjaga tanpa mengabaikan pengembangan pariwisata.

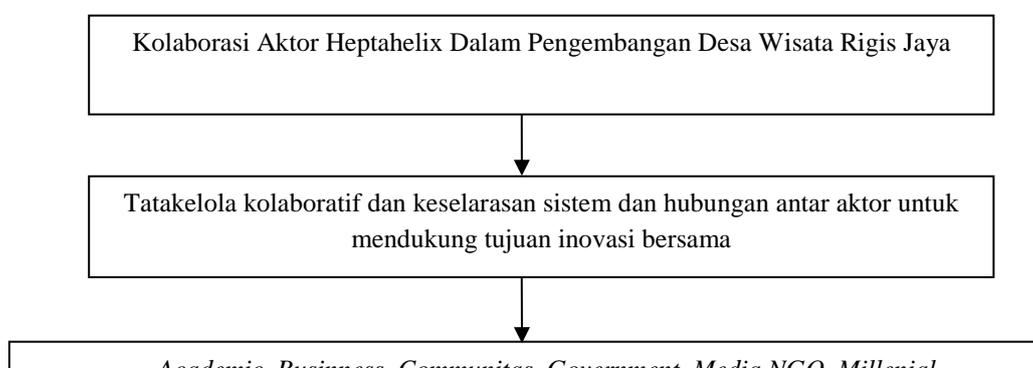
4. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, *et al.* 2022. Pentahelix as Strategy of Tourism Village Development in Karangasem Village, Bulu District, Sukoharjo Regency. *International Journal of Social Science*, 2(4). 1979-1984. Optimalisasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pelaku di daerah; penguatan kapasitas kelembagaan perkantoran dan lembaga teknis yang berperan dalam pengembangan dan peningkatan pariwisata, budaya, dan seni di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis secara mendalam peran dan bentuk kolaborasi masing-masing aktor. Penta helix saat ini menjadi strategi baru di era digitalisasi. Kepala daerah memanfaatkan penta helix sebagai terobosan untuk mengatasi permasalahan yang ada di daerahnya. Penta helix sendiri cukup menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan kolaborasi pengembangan sektor pariwisata di kota Sukoharjo. Dalam menjalankan pentahelix, setiap aktor harus mempunyai sinergi antara satu dengan yang lain. Penta Helix sendiri berisi lima pemangku kepentingan yang saling berkolaborasi. Pelaku dalam penta helix meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Kelima pemangku kepentingan ini saling bersinergi dalam proses pengembangan pariwisata di Sukoharjo dengan tugasnya masing-masing.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Helena Thatcher Pakpahan dkk., yang berjudul *Pentahelix model in agrotourism area development in Karo Regency*

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas strategi helix ganda dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga nirlaba guna mewujudkan inovasi dalam pengembangan Kawasan Agrowisata di Kabupaten Karo. Model Penta Helix dalam pengembangan agrowisata di Kabupaten Karo melibatkan unsur-unsur akademisi, masyarakat, pemerintah, media, dan bisnis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima lembaga yang berperan dalam pengembangan agrowisata di Kabupaten Karo, yaitu: (1) Akademisi, yaitu Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Methodist Indonesia (UMI), Universitas Medan Area (UMA), UMSU; (2) Masyarakat, yaitu kelompok yang peduli terhadap pariwisata; (3) Pemerintah, yaitu pemerintah desa, dinas pertanian, dinas pariwisata; (4) Media, yaitu media cetak dan media online; dan (5) Perbankan (BRI, BNI, Mandiri). Setiap lembaga memainkan peran yang berbeda, mulai dari memberikan pengetahuan dan keahlian, keterlibatan masyarakat, pembuatan kebijakan dan regulasi, promosi dan liputan melalui media, hingga dukungan keuangan melalui perbankan.

2.11 Kerangka Pemikiran

Pihak yang terlibat dalam pengembangan *smart village* berasal dari unsur pemerintah sampai dengan milenial. Sebagaimana dinyatakan oleh Andari & Ella, (2019: 47) dalam implementasi program desa pintar, penentu keberhasilan perkembangan desa menuju desa pintar adalah peningkatan penggunaan penelitian/riset-riSET terdahulu dan pembangunan inovasi, *knowledge*, serta proses pembelajaran. Luaran Teoritis yang dihasilkan yaitu rekonstruksi destruksi konsep/teori, metode. Luaran teori yang dihasilkan adalah:

- Menghasilkan konsep Heptahelix diharapkan dapat menjadi “*pilot project*” pengembangan desa wisata bagi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung yang saat ini sedang mengimplementasikan desa “*smart village*”
- Kolaborasi aktor Heptahelix dalam pembangunan pariwisata di Pekon Rigis Jaya berbasis *smart village*



III. METODE PENELITIAN

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian Administrasi Publik, konsep Heptahelix menawarkan kolaborasi yang lebih dari konsep Pentahelix (*Academisi, Business, Community, Governement dan Media/ABCGM*) yakni ada keterlibatan *NGO dan milenial*. Konsep *Heptahelix* sendiri menempatkan aktor-aktor sebagai berikut : *Government* sebagai *regulator*, *Academic* sebagai *konseptor*, *Bussiness* sebagai *investor*, *Local Community* sebagai *Operator*, *Media* sebagai *promosi*, *Non Government Organization* sebagai *educator* serta *Milenial/kalangan muda* sebagai *Consumer* dan *promosi*.

Fokus pada kolaborasi aktor *Heptahelix* dalam pembangunan pariwisata berbasis *Smart Village*, di desa yang menjadi lokasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif agar bermakna dan tepat untuk memajukan wawasan tentang praktik pengorganisasian tujuh aktor *Heptahelix*. Dalam hal ini, metode pengumpulan data kualitatif digunakan untuk membantu peneliti menangkap peran aktor Heptahelix dalam pengembangan pariwisata di lokasi penelitian. Secara umum penelitian ini ditujukan menghasilkan inovasi/kebaharuan. Mengacu pada Stake dalam tulisan Baxter & Jack, (2008: 549), penulis melakukan kajian mendalam pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tentang inovasi desa dan keberhasilan pengembangan desa wisata di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Borgan & Taylor dalam Moleong (2014), menyatakan metode penelitian kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

3. 1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan secara utuh dan komprehensif fenomena yang

diteliti sehingga pada akhirnya dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

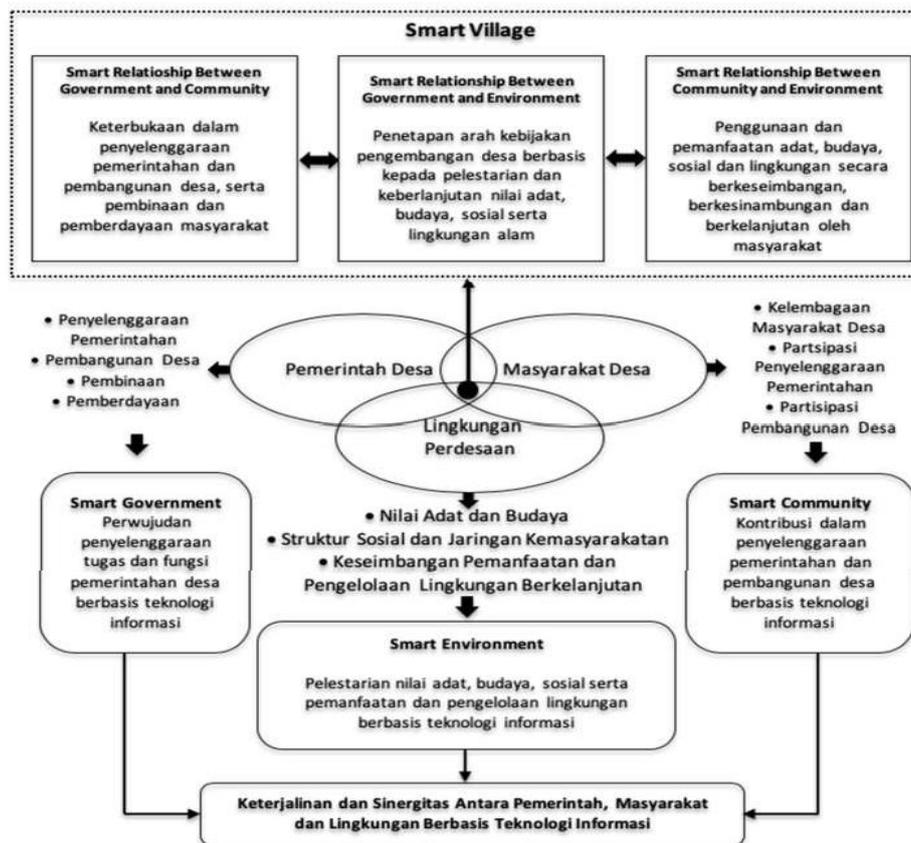
3.2 Lokasi Penelitian

Pekon Rigis Jaya merupakan desa dengan kategori desa rintisan yang ada di Kecamatan Air Hitam, mendapat Anugrah Desa Wisata Indonesia/ADWI (mendapat juara ke 2 kategori desa wisata rintisan dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 terpilih untuk pelaksanaan program *smart village*.

3.3 Fokus Penelitian

A. Mengkaji kolaborasi aktor heptahelix yang meliputi tujuh unsur penting *Academic, Bussiness, Community, Government, Media, NGO* dan *Millenials* (ABCGMNM) dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, menggunakan teori kolaborasi yang diusung oleh Ansell dan Gash (2007). Dalam menentukan komponen kolaborasi sebagai alat analisis dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan perpaduan komponen kolaborasi oleh para ahli tersebut, yang meliputi:

1. Dialog antar-muka (*face to face dialogue*)
2. Membangun kepercayaan (*trust building*)
3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)
4. Pemahaman bersama (*shared understanding*)
5. Komunikasi
6. Koordinasi



Gambar 4. Alternatif Smart Village
Sumber : Dian Herdiana, 2019

B. Mengkaji penerapan *smart village* Di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Dian Herdiana (2019) menyajikan tiga variabel pencapaian dalam konsep *smart village* sebagai fondasi dari penerapan *smart village* yang harmonis, mencakup *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*. namun peneliti juga menganalisis dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi menurut Subekti & Damayanti (2019) yang dapat diidentifikasi melalui *smart government*, *smart people*, *smart environment* serta *smart promotion* dalam meningkatkan layanan publik maupun pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi di Pekon Rigis Jaya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

- Data Primer adalah data yang diperoleh melalui *key informan* yang berkompeten dengan kajian penelitian ini yang meliputi :

1. Akademisi (Akademi Pariwisata Nusantara)
2. Business/ Swasta (Bank Lampung, PLN, Bank BRI)
3. Masyarakat lokal (kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi), Wirausaha Muda Nusantara)
4. Pemerintah (Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Provinsi Lampung)
5. Media (media on line *kampoeng kopi_rigis_official* dan *kopi_rigis_coffecompany*, *pariwisata_lampung_barat* dan *lambar geh*, *masatalampungbarat*, *nusadayaacademy*, *disporapar_lambar*)
6. NGO (Asosiasi Desa Wisata Indonesia dan pegiat pariwisata Keliling Lampung)
7. Milenials (GenPI Lampung dan anggota *Indonesian Fighter Tourism Association* (IFTA))

b. Data sekunder

Table 3. Dokumen Pendukung Penelitian

No	Jenis dokumentasi
1.	Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031
3	Surat Keputusan Gubernur No : G/71/V.12/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung Tahun 2021
4.	Dokumen-dokumen berita yang berkaitan dengan pengembangan agrowisata kampoeng kopi
5.	Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal
6.	Peraturan Menteri Desa, PDT, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal

Sumber : Diolah peneliti, 2023

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap para informan; dengan pendekatan *snowball* yakni menggali informasi sesuai kebutuhan yang diperlukan di lapangan berdasarkan rekomendasi informan dan kebutuhan data sebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting yang bertujuan memperoleh data dalam sebuah penelitian di lapangan. Pengumpulan data menurut Ulber Silalahi (2009:280) merupakan sebuah proses mendapatkan data empiris

melalui responden dengan menggunakan berbagai metode penelitian³⁹. Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data merupakan proses interaksi antara informan dengan peneliti yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab antara informan dan peneliti. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, terdapat beberapa macam metode yang dilakukan dalam melakukan wawancara, diantaranya⁴⁰:

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur dalam teknik pengumpulan data digunakan ketika peneliti sudah memiliki pemahaman yang pasti mengenai informasi yang akan diperoleh dari informan. Sebelumnya, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis, yang telah memberikan jawaban sementara terkait topik yang akan diajukan kepada informan.

2. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan lebih kebebasan dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pendekatan wawancara semi terstruktur bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terbuka terkait permasalahan dan fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, informan diundang untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3. Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak terstruktur dalam teknik pengumpulan data dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Dalam pendekatan ini, proses wawancara tidak dibatasi oleh pedoman yang terinci, namun hanya mengikuti garis besar permasalahan dan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada

³⁹ Fatmawati, "Studi Komparatif Kecepatan Temu Kembali Informasi Di Depo Arsip Koran Suara Merdeka Antara Sistem Simpan Manual Dengan Foto Repro - Diponegoro University | Institutional Repository (Undip-Ir).2013"

⁴⁰ Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)* 2019.

informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka dengan cara yang lebih spontan.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode wawancara secara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan atau fenomena yang diteliti kepada informan, untuk selanjutnya mendapatkan informasi terkait permasalahan dilapangan yang sedang diteliti oleh penulis. Meskipun terstruktur, wawancara ini tetap memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi tanggapan informan secara mendalam. Wawancara terstruktur yang dilakukan penulis melibatkan beberapa pihak yang turut berkontribusi dalam kolaborasi pengembangan agrowisata kampoeng kopi berbasis *smart village*.

Informan tersebut diantaranya yaitu narasumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Camat Kecamatan Air Hitam, Tenaga Pendamping Desa Pekon Rigis Jaya, Kepala Pekon Rigis Jaya, Operator Aplikasi *Smart Village*, Pengurus Kelompok Sadar Wisata Rigis jaya, Admin media sosial agrowisata kampoeng kopi, Pengurus Badan Usaha Milik Pekon Rigis Jaya, pihak Akademisi, Bisnis/Swasta, Media online Kabupaten Lampung Barat serta media online Kampoeng Kopi dan Masyarakat Pekon Rigis Jaya. Berikut daftar informan penelitian dan informasi yang di butuhkan:

Table 4. Daftar Informan Penelitian

Nama Informan	Jabatan	Informasi
Parosil Mabsus	Bupati Lampung Barat	6. Peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata
Cekden Hamdan, S.Sos	Kepala Bidang Destinasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	1. Perkembangan pariwisata di kabupaten lampung barat 2. Kontribusi dinas terkait dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi
Bambang Hermanto, S.Pdi, M.M	Camat Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat	1. Penerapan <i>Smart Village</i> di Pekon Rigis Jaya 2. Peran kecamatan dalam mendukung Smart Village di Pekon Rigis Jaya
Imam	Tenaga Pendamping Profesioanl (TPP) Kecamatan Air Hitam	1. Tugas pendampingan dari TPP Kecamatan Air Hitam tentang penerapan Smart Village Pekon Rigis Jaya

Sugeng	Kepala Desa Rigis Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat mengenai agrowisata kampoeng kopi 2. Pencapaian pembangunan agrowisata kampoeng kopi
Nurrohim	Ketua Kelompok Sadar Wisata Pekon Rigis Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian pembangunan agrowisata kampoeng kopi 2. Kontribusi aktor Heptahelix dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi 3. Penerapan <i>smart village</i> dalam agrowisata kampoeng kopi
M. Rojikin	Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian pembangunan agrowisata kampoeng kopi 2. Kontribusi aktor Heptahelix dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi
Rochim	Sekretaris Kelompok Sadar wisata Pekon Rigis Jaya	Berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur Pekon Rigis Jaya
Fitria Lestari Dan Heru	Operator Aplikasi dan Website <i>Smart Village</i> Pekon Rigis Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Aplikasi <i>Smart Village</i> OpenSID 2. Kendala penerapan sarana dan prasarana penerapan <i>smart village</i>
Bambang Hermanto dan Imam	Camat Kecamatan Air Hitam dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP)	Pelayanan publik berbasis elektronik
Heru Safrudin	Bendahara dan Admin media sosial agrowisata kampoeng kopi	Pencapaian pembangunan pada agrowisata kampoeng kopi
Radep Riyantoro	Akademisi	Kontribusi Akademisi pembangunan pariwisata kampoeng kopi Rigis jaya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Umaryani 2. Yopie Pangkey 3. Mad Hasnurin 4. Yanyan Ruchyansyah 	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, Pendiri Keliling lampung, Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat dan Kepala Dinas Kehutanan Lampung	Penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan NGO pegiat pariwisata Keliling Lampung
PT PLN dan Bank Lampung, Bank BRI	Bussines/Mitra	Kontribusi Bank Lampung dan PLN dan Bank BRI dalam pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi
Media	Promosi Wisata	Peran Media dalam pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi
Asosiasi Desa WisataIndonesia dan pegiat pariwisata	NGO	Peran NGO dalam pengembangan Pariwisata Kampoeng Kopi

“Keliling Lampung”		
Millenial	Penikmat wisata kawasan agrowisata kampoeng kopi	Peran Generasi Milenial dalam Pengembangan Wisata baik konsumen maupun promosi
1. Nurhasanah 2. Mufaridatul	Masyarakat Pekon Rigis Jaya	1. Pendapat mengenai agrowisata kampoeng kopi 2. Pendapat mengenai pencapaian pembangunan agrowisata kampoeng kopi 3. Pendapat mengenai aplikasi <i>smart village</i> dalam menunjang pelayanan di Pekon Rigis Jaya

Sumber : Diolah Peneliti, 2023

b. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan mengamati secara sistematis dan mencatat fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2013), observasi dianggap sebagai dasar seluruh ilmu pengetahuan karena ilmuwan mengandalkan data yang diperoleh melalui observasi terhadap fakta di lapangan. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung, observasi sebagai gambaran riil suatu kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengamatan dapat diklasifikasikan melalui cara berperan serta sebagai partisipan dan tidak berperan serta atau non partisipan. Observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara (Sugiyono, 2018). Penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di Pekon Rigis Jaya. Dalam hal ini, peneliti juga melakukan pencatatan mengenai hasil pengamatan objek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh analisis mendalam mengenai kolaborasi aktor Heptatahelix dalam pembangunan pariwisata serta penerapan *smart village* di Pekon Rigis Jaya. Observasi dilakukan di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat.

3.6 Teknik Analisis Data

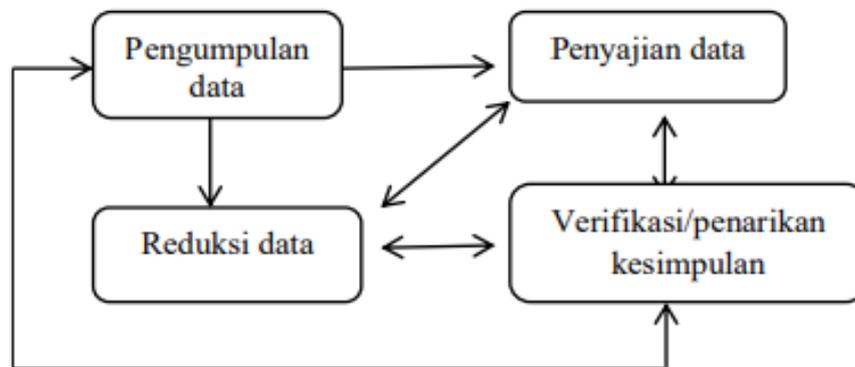
Bogdan & Biklen (Lexy J Moleong, 2010) bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Analisis data dalam penelitian dilakukan saat pengumpulan data dan setelah pengum Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), digunakan untuk mengelompokkan data hasil observasi dan wawancara secara bertahap sehingga diperoleh suatu kesimpulan data.

Penjabaran analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Reduksi data (*data reduction*) Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk memilih data yang dianggap penting, merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung.
- b. Penyajian data (*data display*) Setelah proses reduksi data, proses selanjutnya adalah melakukan penyajian data. penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk grafik maupun diagram. Tujuan penyajian data dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti mendeskripsikan suatu peristiwa/kejadian yang memberikan kemungkinan dalam penarikan kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) Kesimpulan awal yang ditemukan dalam penelitian ini hanya bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan yang kredibel tentang Kolaborasi Aktor Heptahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Smart Village di Pekon rIgis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

Interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut :



Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiono (2012)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Lexy J Moleong (2010) menyatakan bahwa untuk menentukan keabsahan (reliabilitas) data dalam penelitian kualitatif, diperlukan teknik review terhadap sejumlah kriteria. Oleh karena itu, peneliti harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

a. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Penelitian ini menerapkan pendekatan triangulasi data dan teknik. Triangulasi data digunakan untuk menguji keabsahan dengan memeriksa dan membandingkan data dari satu informan dengan informan lainnya. Sementara itu, proses triangulasi teknis dilaksanakan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, teknik triangulasi validitas sumber diterapkan melalui wawancara dengan informan yang telah dipilih sebelumnya. Dari wawancara dengan berbagai informan, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi guna memperoleh data yang sesuai dengan fakta lapangan yang dapat dilihat pada lampiran.

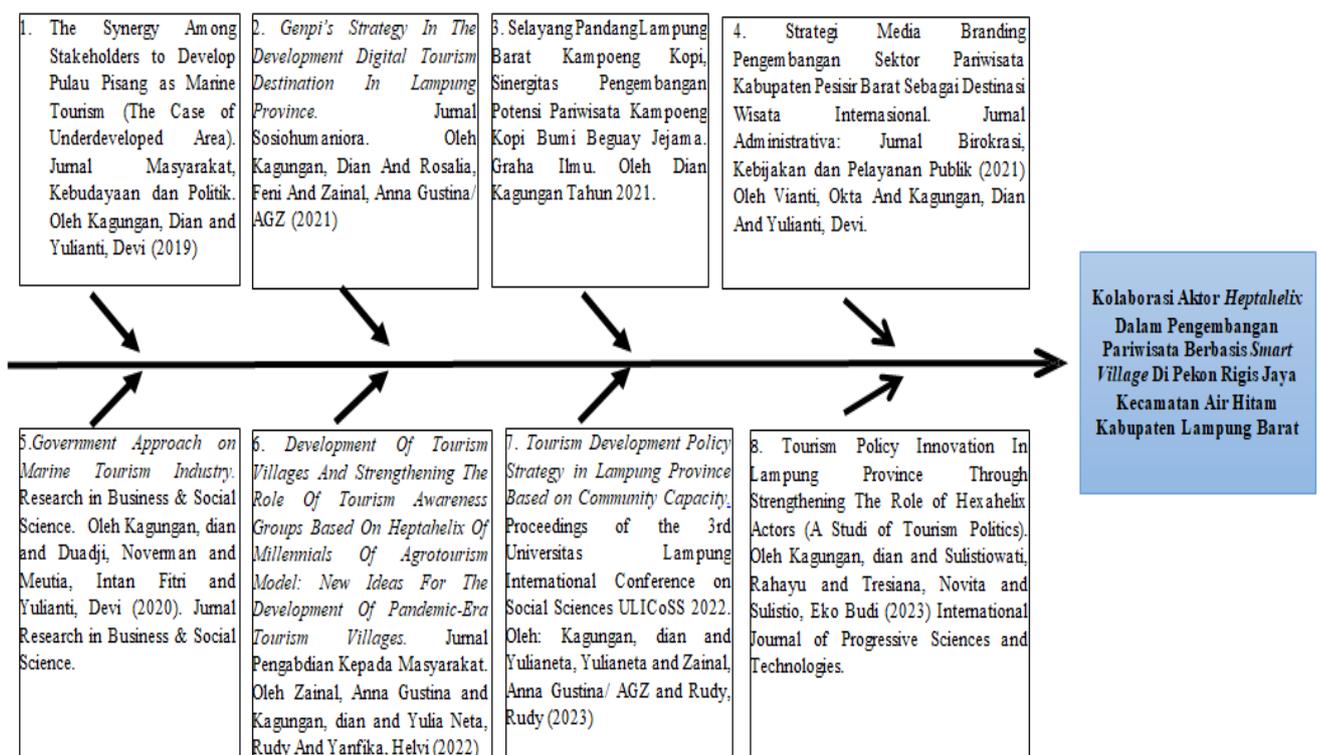
b. Uji keteralihan (*transferability*)

Peneliti menyajikan laporan dengan uraian yang jelas, ringkas, sistematis, dan dapat dipercaya. Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu dan mengaitkannya dengan teori baru, khususnya pada bab penelitian.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Keandalan dalam konteks penelitian kualitatif sering disebut sebagai reliabilitas. Keandalan suatu penelitian dianggap tercapai jika orang lain mampu mengulangi atau mereplikasi langkah-langkah penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, pengujian keandalan dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian. Audit dapat dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing, yang menilai seluruh aktivitas peneliti selama pelaksanaan penelitian (Sugiyono, 2012).

3.8 Road Map Penelitian



1. *The Synergy Among Stakeholders to Develop Pulau Pisang as Marine Tourism (The Case of Underdeveloped Area)*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 32 (1). pp. 16-23. ISSN 2088-7050 Oleh Kagungan, dian and Yulianti, Devi (2019)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang muncul dari ketidakmaksimalan pelaksanaan rencana strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Pisang Island, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sinergitas yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pengembangan wisata bahari di Pisang Island.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, pemaparan dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa strategi pengembangan wisata bahari di Pisang Island tidak berjalan dengan baik tanpa sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan investor. Pemerintah merupakan pihak perintis pembangunan fasilitas baik sarana dan prasarana utama demi terciptanya kemudahan bagi pencarian calon investor yang akan menanamkan modalnya. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu bahwa Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta pendidikan masyarakat untuk menciptakan kesadaran masyarakat. Sedangkan pihak swasta dapat menanamkan modalnya dengan merintis pembangunan sarana yang belum ada untuk mewujudkan kenyamanan wisatawan. Kata kunci: sinergitas; stakeholder; wisata bahari; daerah tertinggal.

2. *Genpi's Strategy In The Development Digital Tourism Destination In Lampung Province*. Jurnal Sosiohumaniora, 23 (2). Pp. 177-186. ISSN 1411-0903 E ISSN 2443 – 2660. Oleh Kagungan, dian and Rosalia, Feni and Zainal, Anna Gustina/ AGZ (2021)

Pengembangan pariwisata Provinsi Lampung adalah sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Indonesia yang menjadi lokomotif pembangunan dan memberikan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui startegi GenPi dalam mengembangkan kebijakan digital tourism destination menuju Lampung go digital. Metode dalam penelitian ini kualitatif, lokasi penelitian ini Pasar Tahura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung. Data dipetik melalui wawancara dan FGD, informan dalam penelitian ini adalah pengurus GenPi Lampung, dua orang pengurus Pasar Tahura dan dua orang pengunjung wisata Pasar Tahura. Berdasarkan stratgei GenPi Lampung untuk mendorong semakin berkembangnya pariwisata di Lampung, GenPI Lampung mengambil peran

penting dalam mengembangkan pariwisata di Lampung dengan dilakukannya promosi yang gencar di media-media sosial, salah satunya dengan mengirimkan konten-konten destinasi wisata di Lampung ke platform GenPi.co.

GenPI Lampung juga melakukan kegiatan offline, salah satunya dengan menciptakan digital tourism destination dalam bentuk pasar rakyat. Digital tourism destination merupakan hasil dari tuntutan era digital mengingat wisatawan zaman sekarang yang didominasi generasi millennial, cenderung menyukai berkunjung ke destinasi yang memberikan pengalaman baru dan menyenangkan. Konsep digital tourism destination ini mengacu pada destinasi yang kreatif, memiliki spot fotogenik untuk diunggah di media sosial, dan viral di media sosial.

3. Selayang Pandang Lampung Barat Kampoeng Kopi :Sinergitas Pengembangan Potensi Pariwisata Kampoeng Kopi Bumi Beguay Jejama, Graha Ilmu. Oleh Dian Kagungan (2021)

Sinergitas aktor-aktor pentahelix dalam pengembangan agrowisata Kampoeng Kopi merupakan keselarasan sistem dan hubungan antar aktor Pentahelix untuk mencapai situasi yang kondusif bagi pembangunan inklusif pada Agrowisata Kampoeng Kopi Riris Jaya. Buku ini berusaha menemukan titik kompromi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata kampoeng kopi.

Untuk membahas perspektif tersebut, isi buku ini terdiri dari empat bab (selain pendahuluan), yaitu bab ke dua berisi Kerangka Dasar Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kampoeng kopi dan juga dilengkapi teori mendasar tentang kebijakan pemberdayaan, dan mengelaborasi beberapa studi pendahuluan yang digunakan sebagai basis dalam memahami perspektif kebijakan pembangunan kepariwisataan kampoeng kopi Dalam konteks kajian penelitian dalam buku ini yang dimaksud dengan sinergitas pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai

kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut. Data di peroleh berdasarkan hasil kajian lapang, bahwa dalam bidang pariwisata, pentingnya sinergitas pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut. lokasi penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sinergitas aktor-aktor pentahelix dalam pengembangan Agrowisata Kampong Kopi merupakan keselarasan sistem dan hubungan antar aktor Pentahelix untuk mencapai situasi yang kondusif bagi pembangunan inklusif pada Agrowisata Kampong Kopi Rigis Jaya. Dalam pengembangan pariwisata berbasis agrowisata kampong kopi ini, tentunya tidak terlepas dari peran para stakeholder dalam proses pengembangannya. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan agrowisata kampong kopi ini diantaranya 1) Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2) Badan Penelitian Dan Pengembangan, 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 4) Dinas Perkebunan dan Peternakan, 5) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 6) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 7) Dinas Koperasi dan Perdagangan, 8) Perguruan Tinggi. Kesimpulan : pentingnya membangun sinergitas antar aktor yang terlibat dalam pembangunan wisata kampong kopi.

4. Strategi Media Branding Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Sebagai Destinasi Wisata Internasional. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*. ISSN 2714-7673, Oleh Vianti, Okta and Kagungan, dian and Yulianti, Devi

Hasilnya adalah Fenomena yang terjadi pada masyarakat modern yakni mulai meningkatnya kegiatan wisata sehingga harus ada suatu strategi yang sesuai perkembangan zaman dan dapat dijadikan sebagai pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata dengan memanfaatkan media digital sebagai media branding yang merupakan bagian dari sebuah komunikasi pemasaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi strategi media branding

dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi wisata internasional, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi media branding dalam pengembangan sektor pariwisata, serta dampak adanya pandemi covid-19 pada sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi media branding pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi wisata internasional yakni penetapan tujuan tahunan implementasinya masih minim karena belum terarah dengan baik begitupun dengan pemanfaatan media yang kurang massif dalam upaya mem-branding pariwisata; perumusan kebijakan yakni adanya surat keputusan tentang pembagian desa wisata; memotivasi pekerja dengan upaya-upaya yang telah dilakukan seperti saling menyemangati, koordinasi, serta evaluasi dalam rapat atau ajakan secara pribadi; kurangnya alokasi SDM yang mumpuni di bidang IT. Selanjutnya faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam media branding tersebut yakni adanya peran masyarakat yang secara tidak langsung ikut serta dalam mem-branding potensi wisata yang ada juga terbatasnya SDM secara kualitas dan kuantitas serta kurangnya peran pemerintah. Kemudian dampak pandemi covid-19 mengakibatkan adanya penurunan jumlah wisatawan serta batalnya event-event yang telah di persiapkan.

5. *Government Approach on Marine Tourism Industry*. Research in Business & Social Science. pp. 197-203. ISSN 2147-4478 (In Press) Oleh Kagungan, dian and Duadji, Noverman and Meutia, Intan Fitri and Yulianti, Devi (2020).

Industri pariwisata memerlukan kerjasama yang di sinergitas antara Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam lingkup pemerintahan Provinsi Lampung, saat ini fokus pada industri wisata bahari sebagai salah satu solusi kesejahteraan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Pesawaran dan Tanggamus, tujuan jangka panjang dari kebijakan industri wisata bahari di kedua kabupaten ini adalah tata kelola masyarakat berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menjelaskan tentang tata kelola kebijakan

industri wisata bahari yang diterapkan melalui gerakan sadar wisata, tampilan citra dan produk wisata serta kerjasama dan koordinasi antar daerah antara Pesawaran dan Tanggamus, itu strategi antar daerah menggambarkan dan menganalisis berdasarkan atraksi, aksesibilitas, fasilitas, dan tambahan. Dengan demikian partisipasi setiap elemen di kedua Kabupaten tersebut akan berdampak pada pengembangan kualitas pariwisata.

6. *Development Of Tourism Villages And Strengthening The Role Of Tourism Awareness Groups Based On Heptahelix Of Millennials Of Agrotourism Model: New Ideas For The Development Of Pandemic-Era Tourism Villages*. E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Oleh Zainal, Anna Gustina and Kagungan, dian and Yulia Neta, and Rudy and Yanfika, Helvi (2022).

Peningkatan kapasitas Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata di Pekon Rigis Jaya dengan mendukung program pengembangan pariwisata unggulan "kampong kopi" di Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu destinasi wisata internasional. Hal ini bertujuan agar promosi dan pemasaran Desa Wisata "kampong kopi" Rigis Jaya menjadi viral, dengan mengundang YouTubers, selebgram, travel vlogger, travel blogger, atau seseorang yang memiliki 3F (*Followers, Fans, Friends*) untuk berkunjung ke desa. Ini termasuk dalam bagian digital *influencer* yang merupakan salah satu strategi komunikasi oleh Kementerian Pariwisata.

7. *Tourism Development Policy Strategy in Lampung Province Based on Community Capacity*. Proceedings of the 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022). Oleh Kagungan, dian and Yulianeta, Yulianeta and Zainal, Anna Gustina/ AGZ and Rudy, Rudy (2023).

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan strategi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung berbasis kapasitas masyarakat. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Wisata Alam 21, Desa Aji Mesir, Kabupaten Tulang Bawang, dan Puncak Temiangan, Desa Trimulyo, Kabupaten Lampung Barat. Hasil dan rekomendasi dari penelitian ini mencakup aspek pengembangan

kepemimpinan, pembentukan komitmen yang dilakukan oleh kepala desa dan masyarakat Desa Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, dan Desa Aji Mesir, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang yang terlibat dalam pengembangan desa wisata melalui kegiatan pelatihan atau kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat.

Dari aspek pengembangan organisasi, pengembangan kapasitas masyarakat terkait organisasi, melalui pembentukan organisasi baru atau peningkatan kapasitas yang sudah ada, melalui program atau target yang telah ditetapkan sehingga kapasitas masyarakat di dua desa pariwisata dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki peran masing-masing. Selanjutnya, dari aspek Kolaborasi Antarorganisasi, baik desa wisata Trimulyo, Kabupaten Lampung Barat, maupun desa Aji Mesir, Kabupaten Tulang Bawang, membangun infrastruktur pendukung untuk masyarakat pariwisata. Ini mencakup pengembangan hubungan dan melakukan kerjasama kolaboratif dengan berbagai elemen, termasuk masyarakat sekitar, sektor swasta, Organisasi Non-Pemerintah (LSM), media, dan pemerintah.

8. *Tourism Policy Innovation In Lampung Province Through Strengthening The Role of Hexahelix Actors (A Studi of Tourism Politics)*. International Journal of Progressive Sciences and Technologies. Oleh Kagungan, dian and Sulistiowati, Rahayu and Tresiana, Novita and Sulistio, Eko Budi (2023)

Aktor Hexahelix memainkan peran penting dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Pesawaran yang merupakan lokasi penelitian ini. Aktor Hexahelix yang dimaksud dalam penelitian ini melibatkan Pemerintah, Lingkaran Bisnis, Media, Universitas, Organisasi Non-Pemerintah (LSM), dan masyarakat lokal. Para aktor Hexahelix ini tentu memiliki peran penting dalam inovasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan tugas, prinsipal, dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis peran masing-masing aktor Hexahelix dalam inovasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data

dikumpulkan melalui wawancara, FGD, dan analisis dokumen/peraturan terkait penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran pada kenyataannya masih didominasi oleh peran Pemerintah, tepatnya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran sebagai sektor utama kebijakan pengembangan pariwisata; sementara itu, peran aktor Hexahelix lainnya belum signifikan dalam inovasi kebijakan pengembangan pariwisata.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

A. Kolaborasi Aktor Heptahelix

Aktor *heptahelix* memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan dan penatakelolaan pariwisata di desa Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Kolaborasi aktor heptahelix dalam kebijakan pengembangan kawasan agrowisata kampoeng kopi Desa Rigis Jaya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pariwisata dan beberapa Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan komunikasi dan koordinasi secara virtual maupun tatap muka melalui forum-forum diskusi yang dilakukan dengan aktor heptahelix.

2. Akademisi

Komunikasi dan koordinasi mayoritas dilakukan dengan masyarakat saja terkait kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat; Diketahui bahwa akademisi belum menjalankan indikator ini dengan optimal terkait pengembangan pariwisata kampoeng kopi, sebab akademisi belum melakukan kerjasama secara kelembagaan antar aktor *heptahelix* dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi.

3. Komunitas

Secara umum masyarakat desa Rigis Jaya baik yang tergabung dalam kelembagaan kelompok sadar wisata, badan usaha milik desa dan kelompok tani sudah berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata yang ada di desa tersebut. Komunikasi dan koordinasi telah dilakukan melibatkan aktor heptahelix lainnya. Namun demikian dukungan terhadap pengembangan usaha produk masyarakat lokal belum sepenuhnya mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat khususnya Dinas

Pariwisata. Karena pada dasarnya bagi masyarakat pemetaan tematik wisata tidaklah cukup berupa *branding*/jargon. Masyarakat yang belum terlibat dalam pengelolaan wisata, perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

4. Bisnis/Swasta/Dunia Usaha

Komunikasi dan koordinasi telah terjalin dengan baik, pengembangan agrowisata kampoeng kopi juga melibatkan Bank Lampung dan Perusahaan Listrik Negara berkontribusi dalam pembangunan fisik agrowisata kampoeng kopi berupa pembangunan aula, pembangunan gapura kampoeng kopi, serta pengembangan anjungan-anjungan yang terletak di Pekon Rigin Jaya.

5. Media

Media berperan penting dalam mempromosikan agrowisata kampoeng kopi. Selain akun instagram milik kelompok sadar wisata, yaitu *kopi_rigin_coffecompany* juga media online kampoeng kopi rigin jaya (*kampoengkopi_rigin_official*) dan *kopi_rigin_coffecompany* serta media online Kabupaten Lampung Barat yaitu *pariwisata_lampungbarat*, *lambargeh* dan *Radar Lambar*; bertujuan mempromosikan produk-produk unggulan kampoeng kopi Rigin Jaya; Komunikasi dan koordinasi dengan aktor heptahelix lainnya dapat dikatakan telah berjalan cukup optimal.

6. Non Government Organization (NGO)

Dari aspek komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, komunikasi dan koordinasi dengan aparat pemerintah desa Rigin Jaya, pokdarwis dan juga bumdes serta Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat; *NGO* berperan dalam pengembangan pariwisata kampoeng kopi melalui kegiatan pendampingan berupa pembuatan paket-paket wisata antara lain paket wisata edukasi bagi pelajar di wilayah Kabupaten Lampung Barat, paket wisata pengolahan aneka produk kuliner berbahan dasar kopi, dan paket wisata memetik buah kopi siap panen.

7. Milenial

Milenial, kalangan muda penikmat wisata, melakukan *explorasi spot-spot* wisata desa Rigin Jaya melalui aktifitas *upload* di media sosial, membuat aneka paket wisata kampoeng kopi Rigin Jaya; bekerjasama dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) melakukan *explore* kawasan agrowisata kampoeng kopi.

B. Smart Village

Pelaksanaan program *smart village* di Pekon Rigis Jaya, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan konsep *smart government*. Terdapat *website* resmi dengan alamat *www.rigisjaya.smartvillage.co.id* dan penggunaan aplikasi *OpenSID*. Hal ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, dalam *website* juga terdapat informasi Agrowisata Kampoeng Kopi dan olahan produk kopi Rigis.

Selanjutnya *Smart People*, kendala utama yang masih dihadapi mengenai partisipasi masyarakat dalam penggunaan akses layanan publik di Pekon Rigis Jaya adalah kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengakses secara mandiri aplikasi yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya alat penunjang berbasis elektronik yang belum dipasang dan ditempatkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat serta belum menyeluruh sosialisasi ke masyarakat tentang *smart village*, karena masih melakukan sosialisasi bersamaan dengan kegiatan perkumpulan seperti bantuan langsung tunai, kumpulan PKK sehingga tidak semua masyarakat ikut serta dalam perkumpulan tersebut dan mengetahui layanan *smart village*.

Selanjutnya *smart environment* Pekon Rigis Jaya telah berhasil mengembangkan Agrowisata Kampoeng Kopi dan Kopi Rigis sebagai identitas unggulan. Masyarakat Pekon Rigis Jaya tetap memelihara kearifan lokal dalam budaya kopi dan memanfaatkannya dengan baik untuk kegiatan agrowisata. Keberhasilan ini memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Upaya *smart promotion* atau promosi di Pekon Rigis Jaya telah dilakukan dengan cukup berhasil melalui digitalisasi menggunakan media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *website*, *blogspot*, serta aplikasi atau *website Mister Aladin*. Meskipun upaya *branding* dan *smart promotion* telah dilakukan masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan strategi ini, mengingat persaingan yang semakin ketat dan adanya desa wisata serupa di berbagai daerah lainnya.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam melakukan promosi kawasan wisata kampoeng kopi yaitu kurangnya keterlibatan sumber daya manusia (SDM) dan antusiasme dari masyarakat untuk meningkatkan

branding Pekon Rigis Jaya. Diperlukan pemahaman dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memperkuat promosi dan memajukan pariwisata di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut pentingnya kolaborasi dalam penerapan *smart village* di Pekon Rigis Jaya, baik antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini memungkinkan berbagai pihak untuk saling berkontribusi, berbagi sumber daya, dan memaksimalkan potensi dalam mengembangkan desa secara holistik dan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi, implementasi *smart village* dapat menciptakan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan melestarikan kearifan lokal serta lingkungan desa.

5.2 Saran/Rekomendasi yang dapat diberikan serta berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pariwisata desa melalui pendekatan kolaboratif.

Karakteristik umum pariwisata desa, khususnya dalam tipologi wisata CBT (*community-based tourism*), menekankan pentingnya partisipasi berbagai pihak. Meskipun demikian, dalam konteks dinamika pariwisata desa di Kabupaten Lampung Barat, terlihat bahwa keterlibatan berbagai pihak belum sepenuhnya menjamin perkembangan pariwisata desa dengan optimal. Untuk mengatasi perbedaan peran antar pihak, diperlukan saluran komunikasi yang efektif guna mencapai tujuan bersama. Kolaborasi, yang diartikan sebagai interaksi dan kontribusi timbal balik, diharapkan dapat memperkuat hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, pemerintah, akademisi/PT, NGO, media, sektor swasta, dan wisatawan, bahkan terhadap sumber daya alam/budaya.

2. Kolaborasi untuk Membangun *Kepercayaan (Trust Building)*

Proses kolaboratif tidak hanya melibatkan negosiasi, melainkan juga melibatkan upaya membangun kepercayaan antara berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pembangunan kepercayaan agar semua pihak bersedia terlibat dalam tata kelola pariwisata secara kolaboratif. Mempertahankan tingkat kepercayaan menjadi langkah awal dalam menjalankan proses kolaborasi. Dari sudut pandang manfaat,

dapat disoroti bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun lokal, akan kembali melalui pelayanan publik dan kebijakan inovatif lainnya. Sementara itu, keuntungan bagi pihak industri/swasta dapat menjadi pemicu peningkatan kualitas daya tarik destinasi wisata mereka. Bagi masyarakat, baik secara individu maupun dalam konteks komunitas NGO, keterlibatan dalam tata kelola wisata desa menjadi suatu kebutuhan aktualisasi peran dan sekaligus dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan.

3. Kolaborasi dalam Membangun Komitmen (*Commitment to Process*)

Tingkat komitmen diantara stakeholders terhadap kolaborasi pemangku kepentingan merupakan variabel kritis dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan dari tata kelola kolaboratif. Kompleksitas tersebut memerlukan penyepakatan bersama bahwa kolaborasi multi aktor memiliki proses yang panjang baik dari sisi waktu. Keinginan para pihak untuk tetap bersama-sama dalam suatu bingkai jejaring perlu terus diperkuat dan “dipupuk”, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan dilemahkan. Inovasi yang diberikan oleh pemerintah dengan memilih pariwisata desa menjadi icon masih memerlukan keseriusan stakeholders pariwisata untuk terlibat aktif dalam jejaring tata kelola pariwisata desa di Kabupaten Lampung Barat khususya di Kecamatan Air Hitam (desa Rigis Jaya)

4. Kolaborasi dalam Membangun Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Dalam proses kolaborasi yang panjang dan kompleks tersebut tetap memerlukan target dan tujuan. Begitu pula perihal tata kelola pariwisata di desa yang menjadi lokasi penelitian. Keinginan dan motif dari para aktor *stakeholders* pariwisata perlu diakomodir dan diputuskan secara proporsional. Kesepahaman bersama yang telah dibangun hendaknya terus diperkuat dan diperluas pihak yang terlibat dalam tata kelola pariwisata desa.

Rekomendasi yang penting dari hasil penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *pilot project* pengembangan desa wisata berbasis *smart village* melalui kolaborasi aktor Heptahelix di Kabupaten Lampung Barat sebagaimana diketahui, Pekon Rigis Jaya merupakan desa rintisan yang berhasil meraih Anugrah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
2. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk *legal draf model/rancangan peraturan daerah* tentang kolaborasi aktor Heptahelix melalui pengembangan desa wisata berbasis *smart village* dan mendesak penganggarannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran 2024 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, O., Monteiro, S., & Thompson, M. (2012). A growth model for the quadruple helix. *Journal of Bussines Economics and Management*, 13(5).
<https://doi.org/https://doi.org/10.3846/16111699.2011.626438>
- Andari, R. N., & Ella, S. (2019). Pengembangan Model Smart Rural Untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 41–58. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1,394>
- Agus. (2023). Stakeholders Mapping in Election Management in West Nusa Tenggara Province. *Revista De Gestão Social E Ambiental*, 17(7), e03618.
<https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n7-014>
- Arnkil, R., Jarvensivu, A., Koski, P., Piirainen, T. 2010. Exploring Quadruple Helix Outlining User-Oriented Innovation Models.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aziiza, A. A., and T. D. Susanto. “The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency).” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 722, no. 1 (2020).
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4).
<https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008>
- Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. (2012). Innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(1), <https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2>
- Celac. (2017). Innovation for Sustainable Rural Sustainable Rural Development: Toward

- Carayannis, elias g, & Campbell, david v j. (2009). Mode 3' and "Quadruple Helix": toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234.
- Chriss Ansell & Alison Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8(4).
- Carayannis E. G. and Campbell D. F. J. (2010), Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and how doknowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinaryanalysisofsustainabledevelopmentandsocialecology, *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development* 2010, 1(1):41–69.
- Carayannis E. G., Barth T. D. and Campbell D. F. J. (2012), The Quintuple Helix innovation model: global warmingasachallengeand driver forinnovation, *Journal of Innovation and Entrepreneurship* 2012, 1:2
- Carayannis E.G. and Campbell D.F.J. (2012), Mode 3 Knowledge Production 1 in Quadruple Helix Innovation Systems.
- Carayannis E.G. and Rakhmatullin R. (2014), The Quadruple/Quintuple Innovation Helixes and Smart Specialisation Strategies for Sustainable and Inclusive Growth in Europe and Beyond, *Journal of the Knowledge Economy*, DOI 10.1007/s13132-014-0185-8 Springer Science and Business Media, New York, 2014.
- Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. (2012). Innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(1), 2. <https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2>
- Carayannis, E., & Grigoroudis, E. (2016). Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness. *Foresight and STI Governance*, 10(1), 31–42. <https://doi.org/10.17323/1995-459x.2016.1.31.42>
- Coleman, James S., Dariyatno, W., Sri, D., Muttaqien, I., & Purwandari, S. (2011). *Dasardasar teori sosial : foundations of social theory (Edisi Revi)*. Nusa Media.

- Diana, D., & Hakim, L. (2021). Strategi kolaborasi antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah: tinjauan konseptual dalam upaya meningkatkan inovasi pendidikan dan kreatifitas pembelajaran di perguruan tinggi. *Prosiding konferensi nasional ekonomi manajemen dan akuntansi (KNEMA)*, 1(1).
- Ella, S., & Andari, R. N. (2018). *Developing a Smart Village Model for Village Development in Indonesia*. Proceeding - 2018 International Conference on ICT for Smart Society: Innovation Toward Smart Society and Society 5.0.
- Etzkowitz H. and Ranga M. (2010), A Triple Helix System for Knowledge-based Regional Development: From Spheresto Spaces.
- Etzkowitz, Henry, and Loet Leydesdorff. "The Triple Helix-University-industrygovernment relations: A laboratory for knowledge based economic development." *EASST review* 14, no. 1 (1995): 14-19.
- Farandy, R. R., Mbulu, Y. P., & Rossi, F. N. (2023). Model Triple Helix Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Religi di Desa Hambalang Kabupaten Bogor. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 11(1), 79-88.
- Fitria, L. (2020). *Sinergitas Aktor Pentahelix Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata Berbasis Agrowisata Kampong Kopi*.
- Field, J. (2010). *Modal Sosial. Kreasi Wacana*, Yogyakarta
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., & Meijers, 2007 *E.Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities*. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology
- Giffinger, Rudolf. "Smart Cities Rangking : An Effective Instrument For The Positioning Of Cities ?" (2007): 703–714.
- Grootaert, C. and Thierry van Bastelaer. 2002. *The Role of Social Capital in Developmental – An Empirical Assessment*. Cambridge: Cambridge University Press. Part 3: The creation and transformation of social capital, terjemahan Dina Swastu Apika
- Galvão, A., Mascarenhas, C., Rodrigues, R. G., Marques, C. S., & Leal, C. T.

- (2017). A quadruple helix model of entrepreneurship , innovation and stages of economic development. *Journal Review of International Business and Strategy*, 27(2), 261–282. <https://doi.org/10.1108/RIBS-01-2017-0003>
- Hastanti, B. W., & Purwanto, P. (2019). Analisis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Mata Air Di Dusun Ngaram-Aram, Desa Crewek, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan (Analysis of social capital in springs management at Ngaram-aram Hamlet, Crewek Village, Kradenan District, Grobogan Regency). *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research)*, 3(2), 89-110.
- Healey, P. (1996). Consensus-building across Difficult Divisions: New approaches to collaborative strategy making. *Planning Practice and Research*, 11(2), 207–2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02697459650036350>
- Herdiana, D. (2019). *Pengembangan Konsep Smart Village bagi Kalurahan-Kalurahan di Indonesia*. *Iptek-Kom*, 21(1).
- Hidayat, H., & Rukmana, A. R. (2021). The Quadruple Helix Strategy for Tourism Development: Case Study at Mekar Rahayu Village, Marga Asih District, Bandung Regency. *Educare*, 13(2), 117-130.
- Hwang, D., & Stewart, W. P. (2017). Social Capital and Collective Action in Rural Tourism. *Journal of Travel Research*, 56(1), 81–93. <https://doi.org/10.1177/0047287515625128>
- Imron, M. (2020). Kolaborasi Quadruple Helix dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas di Desa Palaan. *Journal of Public Sector Innovations*, 4(2), 68– 74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p68 - 74>
- Jaelani, A. (2019). Triple Helix sebagai Model bagi Inovasi Pendidikan Tinggi: Analisis Logika Kelembagaan dalam Pengembangan Kewirausahaan dan Ekonomi. *Al Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* volume 11 (1). Penerbit IAIN Syekh Nurjati, Cirebon
- Kadarisman, Ade. 2019. Peran generasi muda dalam pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan Geopark Ciletuh. *Jurnal UltimaComm*, 11(2):92–108.

- Kagungan, D., Duadji, N., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Research in Business & Social Science Governments ' approach on marine tourism industry policy. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 9(7), 197–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.927>
- Kagungan, D 2021. *Genpy'S Strategy In The Development Digital Tourism Destination In Lampung Province*. *Jurnal Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Padjadjaran*, Volume 23 No 2 Tahun 2021, Sinta 2
- Kagungan, Dian, 2021. *Pentahelix Model Collaboration in Tourism Industry Development Policy in Pesawaran District. Konferensi Internasional IICISFisip Unila*
- Kagungan, D., & Yulianti, D. (2019). The synergy among stakeholders to develop Pisang Island as marine tourism: The case of underdeveloped area. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(1), 16. <https://doi.org/10.20473/mkp.v32i12019.16-23>
- Kagungan, D. Karomani, Gustina, Anna. 2021. *Prospective Study of The Tourism Industry Strategy in The New Normal Era*. *Journal Of Entrepreneurship* (print ISSN: 1099-9264, on line ISSN: 1939-4675) Volume 25 Issue 2.
- Kagungan, D. Yulianeta, Evendia. 2021. *The Legal Political Perspective Of Tourism Development In Lampung Province According To Tourism Law*. Konferensi Ulicos 2021, Universitas Lampung
- Kagungan, D&Meutia “Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dan Penguatan Peran Ekonomi Perempuan Pesisir Dalam Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal.” Other. Bandar Lampung: Lppm Universitas Lampung, Desember 2018. [Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/11560](http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/11560)
- Kagungan, Dian. Rosalia, Feni. 2022. *Milenial Dan Kebijakan Pengembangan Desa Wisata*, Buku Hasil Penelitian. Pusaka Media.
- Kotler, P., Bowen, J & Makens, J. (2006). *Marketing for Hospitality and Tourism* (4th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

- Leydesdorff, Loet, and Martin Meyer. "Triple Helix indicators of knowledge-based innovation systems: Introduction to the special issue." *Research policy* 35, no. 10 (2006): 1441-1449
- Lindmark, A., Stureson, E., dan Ross. 2009. *Difficulties of Collaboration for Innovation*. Land University
- Lindeke, L., Sieckert, A. M, *Nurse-Physician Workplace Collaboration*, Online Journal of Issues in Nursing, 2005.
- Maria, Van Basten, Fernandes Koy, and Olinda Rodrigues. "Pengembangan Smart Environment Di Kampung Wisata Jetisharjo," no. Djunaedi 2014 (2019): 25–32.
- Mukti, A. B., Rosyid, A. N., & Asmoro, E. I. (2020). <http://stp-mataram.e-journal.id/JHI>. *Hospitality*, 9(1), 1–7
- Maturbongs, E. E. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866>
- Mattoriq, Zauhar, Hermawan. 2021. *Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata- Desa "Bumiaji Agrotourism" di Kota Wisata Batu) *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* volume 7 nomor 1 tahun 2021
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (edisi 3).

- Muzaqi, Ajie Hanif, and Berlian Tyasotyaningarum. "Village Community Empowerment Model in Smart Village Perspective (Study on Village Communities in Jombang Regency) Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Smart Village (Studi Pada Masyarakat Desa Di Kabupaten Jombang)" 10, no. 1 (2022): 42–53
- Nugroho, B. P. (2017). *Strategi Bersaing Agrowisata Bhumi Merapi Yogyakarta*.
- Nurhidayati, S. E. (2016). *Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. 9.
- Noor, Iwan. 2017. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang : UB Press
- Oka, I M.D., Darmayanti, P.W. & Sonder, I W. (2021). Turtle conservation in serangan island: the implementation of community-based tourism concepts in tourism development. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 18(2), 172-182. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5668>
- Niode, I. Y., & Rahman, E. (2022). Desain Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Bahari dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3).
- Nursaid, D., Muhadli, R. A., & Zurinani, S. (2022). Ganenan, Pawon, Dan Dieng Culture Festival: Media Interaksi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pariwisata Dieng. *Studi Budaya Nusantara*, 6(2), 123-144.
- Osin, R. F., & Purwaningsih, N. K. (2020). Peran Generasi Milenial Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 63-74.
- Pakpahan, H. T., Sinurat, S. N., & Simatupang, D. (2023). Pentahelix model in agrotourism area development in Karo Regency. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1215-1221.
- Palestho, A. B., & Octanisa, D. S. (2023). Reconstructing Penta-Helix: A Study of A Literature Review. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 5(1), 1-16.

Putra, Yanuar Surya, 2016. Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi. *Jurnal Among Makarti* 9 (18) : 123 – 134

Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect*, 13(Spring), 4. Retrieved:
<http://www.prospect.org/print/vol/13>

Putnam, R., Light, I., de Souza Briggs, X., Rohe, W. M., Vidal, A. C., Hutchinson, J., ... & Woolcock, M. (2004). Using social capital to help integrate planning theory, research, and practice: Preface. *Journal of the American Planning Association*, 70(2), 142-192.

Perguna, L. A., Imamul Huda Al Siddiq, & Irawan. (2019). Desa Membangun UMKM: Pendampingan UMKM berbasis Village-Driven Development dalam Penguatan Ekonomi Warga Di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 217-229. <https://doi.org/10.29062/engagement.v3i2.62>

Praswati, A. N. (2017). Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi. *Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis : Perkembangan Konsep Dan Riset E-Business Di Indonesia*, 690–705. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9022/sansetmab2017_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Persada, Citra. “Kolaborasi Dan Sinergitas Dalam Pembangunan Pariwisata Lampung Menuju Lampung Sebagai Destinasi Unggulan.” *Bunga Rampai Pemikiran Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung*, Oktober 2017, 27–40.

Prasetyo, Pius. Rachmawati, Tutik dkk. 2017. *Inovasi Desa Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan*. Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan Universitas Katolik Parahyangan

Prasetyo, P. S., Gunawan, T., Rachmawati, T., Herwanto, T. S., & Wicaksono, K. W. *Inovasi Untuk Mewujudkan Desa Unggul Dan Berkelanjutan*. Kedua. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2017.

- Pugra, I. W., Oka, I. M. D., & Suparta, I. K. (2021). Kolaborasi Pentahelix Untuk Pengembangan Desa Timpag Menuju Desa Wisata Berbasis Green tourism. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 7(2), 111-120.
- Roberts, D., Van Wyk, R., & Dhanpat, N. (2016). Exploring practices for effective collaboration. *Proceedings of the 29th Annual Conference of the Southern African Institute of Management Sciences (SAIMS)*, 1–13.
- Rahmawati, Triana. “Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro)).” *Jurnal Administrasi Publik* 2, No. 4 (20 April 2014): 641–47.
- Rahu, P. D. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1). <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2286>
- Ranga M. and Etzkowitz H. (2013), Triple Helix Systems: An Analytical Framework for Innovation Policy and Practice in the Knowledge Society, Industry and Higher Education 27(4):237-262.
- Ranga M. and Garzik L. (2015), From Mozart to Schumpeter: A Triple Helix Systems approach to advancing regional innovation in the Salzburg region of Austria, in: Austrian Council for Research and Technology Development (Ed., 2015): Designing the future: economic, societal and political dimensions of innovation. ECHO media Buchverlag, Vienna, August 2015.
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Sari, Yuni. Kagungan. D (2014) “Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal Dan Penguatan Kelembagaan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan* 14, No. 1 (31 Maret 2016): 88–104. <https://doi.org/10.21009/Econosains.0141.07>.
- Schumpeter J.A. (1942), *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper & Brothers.

- Setiawan, Ferry, dan Ahmad Saefulloh. "Kolaborasi Yang Dilaksanakan di Kawasan Wisata Dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya." *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2019. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.95>.
- Sesotyaningtyas, Mega, and Asnawi Manaf. "Analysis of Sustainable Tourism Village Development at Kutoharjo Village , Kendal Regency of Central Java." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 184, no. August 2014 (2015): 273–280. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.091>.
- Sloup, R., Riedl, M., & Machoň, M. (2023). Comprehensive Evaluation of the Design of a New National Park Using the Quintuple Helix Model. *Forests*, 14(7), 1494.
- Susanti, R., Purwandari, S., & Prilosadoso, B. H. (2022). Penta helix as strategy of tourism village development in karangasem village, bulu district, sukoharjo regency. *International Journal of Social Science*, 2(4), 1979-1984.
- Suroija, N., Asrori, M., Nugroho, B. S., & Sulistiyani, E. (2022). Pentahelix Model For The Development Of Ecotourism Karang Ginger Beach Punjulharjo Village, Rembang Regency. *International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEER)*, 2(6), 134-145.
- Subekti, T., & Damayanti, R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1358>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23rd ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaksono, H. (2018b). Roadblock Implementasi Peran Quadruple Helix dalam Upaya Meningkatkan Kapabilitas Inovasi dan Keunggulan Bersaing. *UNEJ E-Proceeding*, 366–381.
- Susanto & Aziiza. 2020. *The Smart Village Model for Rural Area (Case Study: Banyuwangi Regency)*. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
- Syamsul, A. (2018). *Adopsi Inovasi Teknologi Dalam E-Government*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. *Public Administration Review*, 66(1), 20–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x>
- Tia Subekti, Ratnaningsih Damayanti. “Penerapan Model Smart Village Dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi Pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang.” *Journal of Public Administration and Local Governance* 3, no. 1 (2019): 18–28.
- Viale R. and Ghiglione B. (1998), *The Triple Helix model: a Tool for the Study of European Regional SocioEconomicSystems*, Fondazione Rosselli.
- Vipriyanti, N. U. (2011). *Modal Sosial & Pembangunan Wilayah*. Universitas Brawijaya Press.
- Wang, Y. and A. P. (2011). *Destination Marketing and Management. Theories and Applications*. CABI Publishing.
- Wijiharta, W., Hadi, S. N., Murtiyani, S., & Muhajirin, M. (2021). Review of College Collaboration to Improve the Role of Strategic Partners. *Jalin-Mas: Jurnal Kolaborasi dan Pengabdian Masyarakat*, 1(02), 1-7.
- Woo Park H. (2014), Transition from the Triple Helix to N-Tuple Helices? An interview with Elias G. Carayannis and David F.J.Campbell, *Scientometrics*(2014)99:203–207, DOI 10.1007/s11192-013-1124-3.
- Wood, D.J., & Gray, B. (1991) “Toward a Comprehensive Theory of Collaboration.” *The Journal of applied behavior science*, 27 (2), 139-162. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0021886391272001>
- Yawson, R. M. (2009). The Ecological System of Innovation: A New Architectural Framework for a Functional Evidence-Based Platform for Science and Innovation Policy. *The Future of Innovation: Proceedings of the XX ISPIM 2009 Conference, Vienna, Austria, June 21-24, 2009*, 1–16. <https://doi.org/10.31124/advance.7367138.v1>

Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa.

Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Pradnya Paramita.

Yulianto, T. S. (2015). *Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari dan Sambi Kabupaten Sleman*. Universitas Gajah Mada.

Yuningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93>

Yustika, Ahmad Erani 2013: *Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori Dan Kebijakan*. Penerbit Erlangga Jakarta